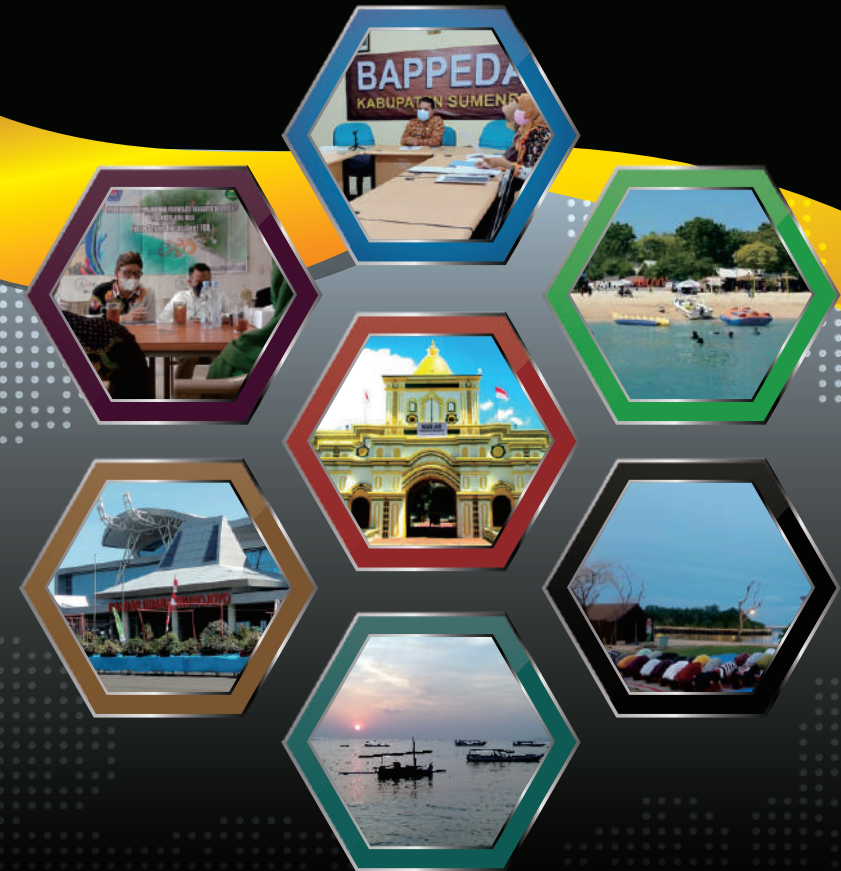


# PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP MODEL HEXA HELIX

Sektor pariwisata memiliki banyak bidang dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi riil, kecil dan menengah. Seperti usaha kuliner dan beragam kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Kondisi ini memberi dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut seiring dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang pembangunan pariwisata di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, dan lainnya. Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019, sektor pariwisata menjadi pilar ekonomi negara.

Sektor pariwisata hingga kini masih menjadi primadona dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena pariwisata menjadi alternatif dalam peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini sekaligus menjadi alternatif dari pengelolaan sumber daya alam berbasis ekstraksi. Maka, pengelola pariwisata perlu mempertimbangan pembangunan pariwisata melalui pendekatan gerakan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis pendekatan pertumbuhan. Selain itu keberhasilan dari pengelolaan dan pemasaran sektor pariwisata adalah dengan memahami tingkat keterlibatan pengunjung terhadap lokasi wisata.

PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP MODEL HEXA HELIX



**Edulitera**  
Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,  
Dau, Kab. Malang (65151)  
Telp./Fax: (0341) 5033268  
Email: eduliteramalang@gmail.com

ISBN 978-623-5693-30-9



**Mohammad Hidayaturrahman  
Rillia Aisyah Haris  
Imam Hidayat**

**PEMBANGUNAN  
PARIWISATA  
DI KABUPATEN SUMENEP  
MODEL HEXA HELIX**

**Mohammad Hidayaturrahman  
Rillia Aisyah Haris  
Imam Hidayat**

## **Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Model Hexa Helix**

### **Penulis:**

Mohammad Hidayaturrahman  
Rillia Aisyah Haris  
Imam Hidayat

### **Editor:**

Andri Saputro  
Finka Widia Cantika

### **Tata Letak:**

A. Hannan

### **Desain Cover:**

A. Mughni

### **Diterbitkan oleh:**

Edulitera (Anggota IKAPI - 29/JTI/2019)  
IMPRINT PT. Literindo Berkah Jaya  
Jl. Raya Apel 28.A Semanding, Sumbersekar, Dau - Malang  
Telp./Fax: (0341) 5033 268  
Email: eduliteramalang@gmail.com  
Website: www.literindo.id

**ISBN:** 978-623-5693-30-9

Cetakan Pertama : Desember 2021  
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm  
Jumlah Halaman : viii + 102 halaman

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta dan pemilik seluruh alam dan isinya. Berkat pertolongan dan hidayah serta maunah-Nya, proses penelitian yang berkaitan dengan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada halangan. Mudah-mudahan syukur yang dipanjatkan akan menambah keberkahan pada segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua. Semoga pula, syukur yang telah dilakukan akan menambah banyak rejeki dan karunia yang selama ini telah Allah SWT berikan kepada para hamba-Nya. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua keluar dari kegelapan, kebodohan jahiliyah, menuju jalan terang, penuh hidayah dan kedamaian. Semoga salawat dan salam juga terlimpah bagi keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman.

Selanjutnya, buku yang berjudul “Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Model Hexa Helix” ini merupakan tulisan yang disusun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Wiraraja Madura menggunakan dana swakelola yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep tahun 2021. Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, atas terselenggaranya penelitian yang telah dilakukan dan terbitnya buku ini. Buku ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan di dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Terutama yang berkaitan dengan keterlibatan enam unsur (*hexa helix*) dalam pembangunan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Sumenep.

Kami mohon maaf, jika dalam proses penelitian dan penulisan buku ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Kritik, masukan serta koreksi dari semua pihak, sangat diharapkan untuk perbaikan isi buku ini pada masa mendatang.

Sumenep, 10 November 2021  
Tim Peneliti



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>LATAR BELAKANG</b> .....	1
Rumusan Masalah .....	4
Tujuan Penelitian .....	4
Manfaat Penelitian .....	4
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	5
Pengembangan Sektor Pariwisata .....	5
Pengembangan Pariwisata Model Penta Helix.....	8
Pengembangan Pariwisata Model Hexa Helix .....	13
<b>MATERI DAN METODE</b> .....	15
Lokasi .....	15
Teknik Pengumpulan Data .....	15
Teknik Analisis Data .....	16
Reduksi Data .....	16
Display Data.....	17
Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan .....	17
<b>PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP DAN KOTA BATU</b> .....	19
Potensi Pariwisata di Kabupaten Sumenep.....	20
Peran Enam Unsur Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep .....	22
Unsur Pendidikan ( <i>Academic</i> ).....	22
Unsur Dunia Usaha ( <i>Business</i> ) .....	24
Unsur Masyarakat ( <i>Community</i> ) .....	25
Unsur Pemerintah ( <i>Government</i> ) .....	27
Unsur Media .....	30
Unsur Kesehatan ( <i>Health</i> ).....	31
Peran Enam Unsur ( <i>Hexa Helix</i> ) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kota Batu .....	36
Unsur Pendidikan ( <i>Academic</i> ).....	36

Penemuan Baru ( <i>Invention</i> ) .....	36
Identifikasi ( <i>Identification</i> ) .....	37
Pembingkaiian ( <i>Framming</i> ) .....	37
Promosi ( <i>Promotion</i> ) .....	37
Pembinaan ( <i>Founding</i> ) .....	37
Unsur Pengusaha ( <i>Business</i> ) .....	38
Membangun Destinasi Wisata .....	38
Menciptakan Profit .....	38
Membangun Sarana Prasarana .....	39
Promosi .....	39
Pembinaan .....	39
Unsur Pemerintah ( <i>Government</i> ) .....	40
Pemberdayaan SDM .....	40
Identifikasi .....	40
Pembangunan Objek Wisata .....	41
Framming .....	42
Promosi .....	42
Branding .....	42
Unsur Komunitas ( <i>Community</i> ) .....	42
Unsur Media ( <i>Media Massa</i> ) .....	44
Unsur Kesehatan ( <i>Health</i> ) .....	45
Keterkaitan Enam Unsur ( <i>Hexa Helix</i> ) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep .....	51
Keterkaitan Enam Unsur ( <i>Hexa Helix</i> ) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kota Batu .....	52
<b>MODEL HEXA HELIX PEMBANGUNAN PARIWISATA .....</b>	<b>54</b>
Unsur Pendidikan ( <i>Academic</i> ) .....	54
Unsur Dunia Usaha ( <i>Business</i> ) .....	56
Unsur Komunitas ( <i>Community</i> ) .....	59
Unsur Pemerintah ( <i>Government</i> ) .....	61
Unsur Media .....	64
Unsur Kesehatan ( <i>Health</i> ) .....	66
Keterkaitan Unsur Hexa Helix .....	68
Kesimpulan .....	73
Saran dan Rekomendasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	<b>83</b>



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Objek Wisata Gili Labak. Salah Satu Potensi di Kabupaten Sumenep. ....	21
Gambar 2.	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang Dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021.....	35
Gambar 3.	Peran Unsur Akademik Dalam Pembangunan Pariwisata. ....	38
Gambar 4.	Peran Dunia Usaha Dalam Pembangunan Pariwisata. ...	40
Gambar 5.	Model Pembangunan Pariwisata di Kota Batu .....	41
Gambar 6.	Model <i>Framming</i> Kolaborasi di Kota Batu .....	42
Gambar 7.	Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu.....	43
Gambar 8.	Peran Media Dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu.....	45
Gambar 9.	Foto Bersama Usai Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021. ....	50
Gambar 10.	Unsur pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep perspektif hexa helix, 2021.....	68
Gambar 11.	Keterkaitan hexa helix di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata, 2021. ....	73





# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sumenep Tahun 2015–2020 .....	31
<b>Tabel 2.</b> Realisasi Penyetoran Retribusi Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Museum Keraton, Event Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2020.....	32
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Batu Tahun 2016–2020 .....	46
<b>Tabel 4.</b> Aktivitas Pengembangan Pariwisata di Kota Batu.....	53



# LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir sektor pariwisata khususnya, sebelum pandemi Covid-19 terjadi, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di dunia. Pada tahun 2014, industri pariwisata menjadi industri besar dengan pendapatan mencapai US\$ 7,6 triliun (Setyowati & Octavia, 2016). Di Indonesia, sektor pariwisata juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama sebelum covid-19. Beragam industri dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian di Indonesia (Hulu, 2018). Sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional (Withaningsih et al., 2018). Pada tahun 2015, sektor pariwisata menduduki peringkat keempat dalam pemasukan devisa negara, yaitu sebesar 9,3%. Selain itu, sektor pariwisata membuka setidaknya 9,8 juta lapangan pekerjaan atau 8,4% lapangan kerja nasional (Kriswibowo, 2016). Namun setelah Covid-19 melanda, kegiatan bisnis pada industri pariwisata bagi negara-negara yang bergantung pada industri pariwisata mengalami kesulitan, setidaknya pada saat pandemi masih berlangsung. Untuk kembali ke situasi normal dibutuhkan kerja keras. Sektor pariwisata harus berjuang untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki, sehingga industri pariwisata dapat menjadi menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) (Fernandez et al., 2021).

Sektor pariwisata memiliki banyak bidang dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi riil, kecil dan menengah. Seperti usaha kuliner dan beragam kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Kondisi ini memberi dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat (Musthofa, 2019). Hal tersebut seiring dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang pembangunan pariwisata di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, dan

lainnya (Sonder & Yulianie, 2019). Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019, sektor pariwisata menjadi pilar ekonomi negara (Yatmaja, 2019).

Sektor pariwisata hingga kini masih menjadi primadona dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena pariwisata menjadi alternatif dalam peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini sekaligus menjadi alternatif dari pengelolaan sumber daya alam berbasis ekstraksi (Yuli, 2011). Maka, pengelola pariwisata perlu mempertimbangan pembangunan pariwisata melalui pendekatan gerakan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis pendekatan pertumbuhan (Smrensens & Grindsted, 2021). Selain itu keberhasilan dari pengelolaan dan pemasaran sektor pariwisata adalah dengan memahami tingkat keterlibatan pengunjung terhadap lokasi wisata (Hogg et al., 2011).

Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, berhasil membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah. Banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang dulunya tertinggal, sekarang berhasil maju setelah pembangunan dengan pemanfaatan lingkungan alam secara bijak, dengan menggalakkan sektor pariwisata, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Batu, Jawa Timur. Industri pariwisata perlu melibatkan aspek sosial masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan keberlanjutan pariwisata bisa dilihat dari pemanfaatan lingkungan alam yang bertanggung jawab (Farkic et al., 2021).

Pada sisi lain, kemajuan di sektor pariwisata juga menyisakan persoalan, salah satunya adalah adanya ketimpangan yang terjadi antara pengusaha besar di bidang pariwisata dengan kegiatan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat dan usaha kecil menengah. Dalam pandangan sebagian kalangan, bisnis pariwisata lebih banyak menguntungkan investor, sementara masyarakat lokal hanya mendapat peran sedikit di dalam pengelolaan pariwisata (Yulianti et al., 2019). Padahal dalam beberapa kasus, saat masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola wisata, mereka juga berhasil mengembangkannya dengan baik. Sehingga dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kegiatan pariwisata yang

dikelola oleh masyarakat yang tidak terurus dan bahkan tutup (Intan, 2019). Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki persoalan berkaitan dengan pelestarian budaya lokal dan lingkungan hidup (Nyoman, 2019).

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata bahari, wisata religi, wisata budaya, wisata alam, dan lain-lain. Pembangunan pariwisata tetap perlu menfokuskan terhadap nilai dan situs warisan, pelestarian sejarah sehingga juga mampu memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dari pembangunan pariwisata (Li et al., 2022). Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi wisata, pembangunan sektor pariwisata sudah mulai dilakukan di Kabupaten Sumenep. Hal ini ditandai dengan beroperasinya Bandara Udara Trunojoyo yang melayani penerbangan perintis antarpulau dan penerbangan komersil Surabaya-Sumenep. Hal ini juga terus didorong dengan upaya pembangunan fasilitas bandara dan perluasan landasan pacu, serta pembukaan rute Bali-Sumenep dengan pesawat yang bisa *landing* dan *takeoff* di atas air. Begitu pula dengan pembangunan fasilitas di sektor pariwisata, seperti hotel bintang dua, bintang tiga, dan bintang empat, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya..+

Meski begitu, pembangunan di sektor pariwisata yang terus digencarkan di Kabupaten Sumenep belum mampu menjadi daya dorong yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan warga. Banyak objek wisata yang telah ada, belum mampu menjadi kantong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti yang terjadi pada wisata Kampung Pasir di Desa Legung Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep sejak ditetapkan sebagai kampung wisata pasir. Begitu pula dengan wisata Keris di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Hal ini tidak lepas dari belum berpadunya seluruh elemen di dalam menggerakkan sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata perlu bersifat integral dan *holistic*, sehingga berdampak pada pelaku pariwisata dan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Pelibatan seluruh *stakeholders* untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan pariwisata (Kronenberg & Fuchs, 2021).

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan enam unsur (*hexa helix*) yang terdiri dari dunia pendidikan (*academic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media massa (*media*), dan kesehatan (*health*) dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur?
2. Bagaimana keterkaitan enam unsur (*hexa helix*) yang terdiri dari dunia pendidikan (*academic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media massa (*media*), dan kesehatan (*health*) dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Keterlibatan enam unsur (*hexa helix*) dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang meliputi dunia pendidikan (*academic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media massa (*media*), dan kesehatan (*health*) atau disingkat ABCGMH.
2. Selain itu dilakukan analisis terhadap keterkaitan diantara enam unsur (*hexa helix*) yang meliputi dunia pendidikan (*academic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media massa (*media*), dan kesehatan (*health*) atau disingkat ABCGMH, dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

## Manfaat Penelitian

1. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberi perspektif dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian dan teori pembangunan, terutama yang berkaitan dengan paradigma Penta Helix. Di dalam penelitian ini terdapat perspektif baru, yaitu Hexa Helix.
2. Bagi pemangku kebijakan (*stake holders*) yang terlibat di dalam pembangunan pariwisata, hasil kajian di dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, di dalam perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan di sektor pariwisata.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu tambahan informasi tambahan yang berkaitan dengan topik pembangunan di sektor pariwisata.



# KAJIAN PUSTAKA

## **Pengembangan Sektor Pariwisata**

Pembangunan sektor pariwisata dilaksanakan dengan mengembangkan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat (Hasan & Hermawan, 2018). Pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek; seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia mampu mendatangkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah serta penyerapan investasi serta mengurangi pengangguran dengan membuka banyak lapangan pekerjaan baru (Rahma, 2020). Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata tidak dapat hanya bergantung pada unsur pemerintah saja, mengingat banyak stakeholder yang terlibat dan berkepentingan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sinergitas dalam pengelolaan sektor pariwisata (Riskiyah, Liyushiana, Herman, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat beberapa asas pembangunan kepariwisataan (Kurnia, 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.
2. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.
3. Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam

mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

4. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.
5. Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.
6. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.
7. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.
8. Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.
9. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
10. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.
11. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku; wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Oktaviarni, 2018), disebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 5) memberdayakan masyarakat setempat; 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan

antarpemangku kepentingan; 7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan 8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataian yaitu mencakup: (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan kepariwisataan. Keempat pilar tersebut perlu dilakukan secara simultan, berkeimbangan, dan bukan merupakan urutan yang sekuensial (Lambaihang, 2018).

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya (Lestari & Firdausi, 2017). Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/ infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan (Setijawan, 2018). Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/ kota dan provinsi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing (Fajar & Rahman, 2021). Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme



operasional di bidang kepariwisataan (Hilman & Kartika, 2020). Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata.

Sementara itu, tujuan kepariwisataan Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Yanti, 2020), adalah untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antarbangsa.

### **Pengembangan Pariwisata Model Penta Helix**

Pengembangan sektor pariwisata yang bersinergi melalui kolaborasi Model Penta Helix pertama kali diperkenalkan oleh menteri pariwisata Arief Yahya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa pentingnya ekosistem pariwisata sebagai rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage, value chain*, dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *business, government, community, academic, and media* (BGCAM) agar terintegrasi dengan baik untuk menciptakan harmoni dan menghasilkan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka pelibatan secara bersama-sama multistakeholder dalam mengembangkan sektor pariwisata semaksimal mungkin dari kolaborasi antareleman yang terkait langsung dengan industri pariwisata (Vani, Priscilia dan Adianto, 2020). Interaksi antara pemerintah, industri pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat, dan media signifikan untuk mengembangkan pariwisata berbasis inovasi.

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berperan sebagai pembuat kebijakan tentang pariwisata di daerahnya dalam rangka meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata (Ningsih dan Dewantara, 2019). Pitana dan Diarta (2009) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kebijakan strategis dan tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata yaitu:

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap kegiatan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan di suatu daerah.
2. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap upaya pengembangan struktur pariwisata yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, serta pemerintah daerah dan tingkat atasannya menurut asas perbantuan.
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut maupun udara dan dilengkapi prasarana komunikasi.
4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan pada kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai tenaga kerja di bidang pariwisata.
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun dalam rencana kongkret termasuk di dalamnya: 1) evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestarian; 2) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; 3) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang berdampak pada keragaan (*performance*) pariwisata, dan; 4) mengelaborasi program dalam pembiayaan untuk aktivitas pariwisata, baik sektor publik maupun swasta.

Media merupakan salah satu unsur dalam *penta helix* selain pemerintah, swasta sektor, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat. Menurut

Soemaryani (2016), media dapat membantu dalam mempromosikan potensi wisata. Muhyi dkk. (2017) menjelaskan bahwa *penta helix* adalah penambahan strategi *triple helix* dengan melibatkan elemen komunitas dan organisasi nirlaba untuk mewujudkan inovasi. Media merupakan pemangku kepentingan yang juga memainkan peran penting dalam menginformasikan bisnis, termasuk mengembangkan bisnis, dan dalam mempromosikan bisnis. Media juga penting dalam mempromosikan daerah pariwisata.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata atau dalam istilah yang lebih populer dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT) merupakan salah satu pendekatan pengembangan pariwisata dengan menekankan masyarakat sebagai inisiator dan pelaku utama, sebagaimana pendapat bahwa pengembangan berbasis komunitas mengedepankan komunitas sebagai pelaku utama dari pembangunan (Chaskin, 2001; Maulana, 2013).

Pramala (2018) menyebutkan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain *Community Based Tourism* (CBT) merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai pendekatan yang menekankan pada masyarakat sebagai unsur utama, *Community Based Tourism* (CBT) merupakan salah satu pendekatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Salah satu kunci utama dalam keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) adalah partisipasi aktif pihak-pihak yang terlibat didalamnya termasuk stakeholder yang bermitra dengan komunitas tersebut. Dengan kata lain, dalam konteks menjalin kerjasama yang baik kemitraan perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata oleh masyarakat.

Adapun peran unsur masyarakat dalam pengembangan pariwisata menurut Herdiana (2019), dapat dibagi menjadi beberapa peran yaitu: *Pertama*, peran masyarakat sebagai pemrakarsa yaitu masyarakat menjadi pihak pertama yang menemuknenali dan menggali potensi pariwisata. *Kedua*, peran masyarakat sebagai pelaksana yaitu masyarakat menjadi pihak yang menginisiasi pelaksanaan dan pengembangan pariwisata sampai dengan terwujudnya objek wisata. *Ketiga*, peran masyarakat sebagai penyerta yaitu masyarakat turut serta dalam proses pengembangan

pariwisata, namun bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengembangan pariwisata, melainkan turut berpartisipasi sebagai salah satu aktor atau pelaku pengembangan wisata. *Keempat*, peran masyarakat sebagai peninjau yaitu masyarakat bukan pihak yang mengembangkan pariwisata, namun melakukan pengawasan mengenai proses maupun dampak dari adanya pengembangan pariwisata. *Kelima*, masyarakat berperan sebagai penerima manfaat yaitu masyarakat tidak terlibat dalam pengembangan pariwisata, namun menerima manfaat dari adanya pengembangan pariwisata. Berbagai peran masyarakat tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung pengembangan pariwisata, namun dengan intensitas dan kepentingan yang berbeda-beda.

Menurut Persada (2017), Ada lima kelompok kunci yang dapat berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata yaitu: *academic, businessman, community, government* dan media atau dikenal dengan lima pilar (ABCGM). Dalam pariwisata masing-masing *stakeholder* ini mempunyai peran masing-masing. Pemerintah berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana. Pengembangan destinasi maupun pengembangan industri memerlukan regulasi yang jelas dan bijak serta kelembagaan yang padu baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Dalam ketergantungan tersebut dapat diidentifikasi pembagian peran atau siapa melakukan apa. Pengembangan industri atau usaha pariwisata tentunya dilakukan oleh swasta dan pemerintah berfungsi memfasilitasi dan mendukungnya.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota bertugas memberdayakan masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara di tempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Selain itu juga pemerintah berperan langsung dalam pengembangan regulasi untuk mengatur, mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan untuk peningkatan kapasitas

dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Sementara itu, *business* (swasta/ dunia usaha) berperan sebagai penyelenggara bisnis pariwisata sesuai etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran dunia usaha sebagai lembaga yang berorientasi pada keuntungan juga harus ikut bertanggung jawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pariwisata.

Di samping itu juga kemitraan swasta dengan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan. Hubungan yang saling menguntungkan (*mutualisme*) harus dibangun dengan pola-pola pendekatan yang formal maupun nonformal. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satu alasannya karena membangun pendekatan non formal antara swasta dan pemerintah. Di sisi lain, dukungan *community* di dalamnya masyarakat dan komunitas-komunitas (NGO/ LSM) juga sangat dibutuhkan; komunitas masyarakat berperan mendukung *sapta pesona*, *darwis plus* dan menyediakan jasa pariwisata, ekonomi kreatif.

Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pariwisata itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat juga bisa menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dalam pengembangan pariwisata dan juga mengetahui bahwa pengembangan pariwisata tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga. Pendampingan terus menerus dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan swasta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.

Akademisi berperan melakukan berbagai riset/ penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan pengembangan pariwisata, agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian mampu berkontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata. Seringkali peran hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, komunitas masyarakat dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata.

Media sebagai unsur kelima yang penting dalam pengembangan sektor pariwisata saat ini terutama media *online* saat ini menjadi kekuatan informasi dan andalan dalam promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran pariwisata sekarang dapat dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan media sosial. Promosi sekarang lebih bersifat inklusif. Contoh, wisatawan dapat mengunggah testimoni di media sosial setelah berkunjung ke suatu obyek wisata.

### **Pengembangan Pariwisata Model Hexa Helix**

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2019 telah memporak-porandakan hampir semua sektor kehidupan manusia, termasuk sektor pariwisata yang juga terkena dampaknya. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Menurut Sutrisnawati, Budiasih dan Ardiasa (2020) penyebaran virus Covid-19 telah mempengaruhi industri pariwisata. Hal ini diperparah dengan adanya pembatasan perjalanan yang dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia dalam upaya untuk menahan laju penyebaran virus ini. Menurut World Travel and Tourism Council (WTTC), sekitar 50 juta orang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata saja akibat pandemi virus Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya dengan menerapkan program *cleanliness, health, sustainability and environment* (CHSE) dan mendorong pengelola usaha pariwisata lainnya, seperti hotel dan restoran sebagai strategi mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program *cleanliness, health, sustainability and environment* (CHSE) merupakan program dari Kemenparekraf dalam beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru (*new normal*) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini dibuat dengan melihat kondisi saat ini dimana virus Covid-19 masih berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Sutrisnawati, Budiasih dan Ardiasa, 2020).

Dengan penerapan program *cleanliness, health, sustainability and environment* (CHSE) diharapkan dapat membantu pemulihan sektor pariwisata agar dapat bangkit kembali di tengah pandemi. Penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap destinasi wisata maupun di sarana-sarana penunjang seperti hotel, restoran, toilet, supermarket dan lain sebagainya diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal, berwisata dan lain sebagainya dengan beradaptasi di era *new normal*.

Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata perlu diperkuat melalui interaksi antara pemerintah, industri pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat, media dan kesehatan (*health*). Interaksi sinergis antara *hexa helix* layak untuk dikembangkan sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep khususnya pada masa pandemi saat ini agar dapat bangkit kembali..

# MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Penelitian ini mengkomparasikan pengembangan pembangunan di Kabupaten Sumenep, dengan pengembangan pembangunan pariwisata di Kota Batu, khususnya yang berkaitan dengan enam unsur (*hexa helix*), yang terdiri dari unsur akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan kesehatan. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis, keterkaitan enam unsur tersebut di dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep. Keterkaitan satu unsur terhadap unsur-unsur lainnya.

## Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian, seperti pengumpulan data dilakukan. Berdasar pada judul penelitian ini yaitu “Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Model Hexa Helix”, maka lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Adapun aspek komparasi dari penelitian juga berada di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung selama empat bulan, mulai dari Agustus sampai dengan November 2021.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). *Focus group discussion* (FGD) merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan tujuan memperoleh informasi, berdasarkan keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta atas suatu topik, dengan adanya seorang moderator sebagai pengarah jalannya diskusi (Paramita & Kristiana, 2013). *Focus group discussion* (FGD) dilakukan di Kabupaten Sumenep dan Kota Batu, Jawa Timur. Nara sumber yang dihadirkan di dalam kegiatan *Focus group discussion* (FGD) terdiri dari enam unsur yang terlibat dari kegiatan pariwisata, yaitu; dunia pendidikan terdiri dari perguruan tinggi Universitas Wiraraja, dunia usaha terdiri dari perusahaan dan perbankan, komunitas terdiri dari



karang taruna dan kelompok sadar wisata, pemerintah terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan pemerintah desa, media massa terdiri dari media mainstream dan media sosial, dan bidang hukum serta perizinan.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang secara umum. Pertanyaan bersifat spontanitas dan dilakukan dengan membangun situasi percakapan informal. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumenep dan Kota Batu, Jawa Timur sebagai narasumber.

Dilakukan pula pengamatan langsung (observasi) terhadap kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Sumenep dan Kota Batu, Jawa Timur. Mengingat observasi dilakukan untuk peneliti dapat meninjau dan melakukan analisis secara langsung terhadap tingkah dan perilaku kelompok ataupun individu untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan luas tentang masalah yang sedang diteliti (Nugrahani, 2014). Hasil penelitian ini disusun menjadi masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep di sektor pariwisata, kemudian menjadi buku panduan model pengelolaan sektor pariwisata perspektif *hexa helix*.

## **Teknik Analisis Data**

Menurut Ibrahim (2015: 103) analisis data dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah, dan mengolahnya ke dalam susunan tulisan yang sistematis serta bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi maupun fakta yang berserakan, maka proses penyusunan data yang kemudian diolah ke dalam pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah dipahami dan dimaknai. Terdapat beberapa ragam teknik analisis data, salah satunya ialah analisis data model interaktif (Ibrahim, 2015:108-112).

## **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dihasilkan dari lapangan, kemudian membuat rangkuman dan memasukkannya ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan data berupa hasil *focus group discussion* (FGD) baik yang dilakukan di Kabupaten Sumenep maupun di Kota Batu. Selain itu data juga dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen. Setelah data yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, perspektif *hexa helix* berhasil dikumpulkan, peneliti memilah dan memilih data tersebut, sesuai dengan kategori indikator yang ada, yaitu akademik, usaha, komunitas, pemerintah, media, dan kesehatan.

### **Display Data**

Sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel, dan semacamnya. Data yang telah dipilih dan dipilih berdasarkan kategori yang ada di dalam fokus, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk gambar dan grafis yang relevan dengan materi penelitian berdasarkan indikator yang telah sebelumnya ditentukan. Narasi yang disajikan, menggambarkan secara jelas dan gamblang, peran setiap unsur di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep berdasarkan perspektif *hexa helix*. Disajikan pula keterkaitan setiap unsur di dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep. Narasi yang disajikan diperkuat dengan grafis yang menggambarkan kondisi pembangunan sektor pariwisata. Begitu pula dengan foto dan gambar yang relevan juga ditampilkan di dalam hasil penelitian.

### **Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan**

Langkah ini dilakukan sebagai konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman maupun penafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir dalam penelitian. Tahapan analisis dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah peneliti berdasarkan satuan kategorisasi (aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus). Artinya, proses analisis penelitian dianggap selesai ketika seluruh data yang telah dihasilkan

dan disusun dapat memberi jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian (fokus). Verifikasi dan pengambilan data di dalam penelitian ini dilakukan pada bagian pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah diuraikan di dalam *display data*, kemudian didiskusikan dengan berbagai penelitian lain yang relevan dengan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep perspektif *hexa helix (empirical discussion)*. Diskusi atau pembahasan juga dilakukan secara teoritis dengan teori yang relevan dengan teori pembangunan, terutama teori yang berkaitan dengan *hexa helix (theoretical discussion)*. Terakhir, peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah disajikan dan didiskusikan atau dibahas.



# PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP DAN KOTA BATU

Pengembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir telah gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, berada di garis khatulistiwa, serta kekayaan panorama yang eksotis menjadi potensi dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan hampir di semua daerah di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, telah berhasil membangun daerahnya, berbasis pada sektor pariwisata. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah Provinsi Bali, Kota Batu, dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur juga memiliki potensi wisata yang layak untuk dikelola sebagai modal pembangunan. Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 127 pulau-pulau besar-kecil, berpenghuni dan tidak berpenghuni, menjadi potensi wisata bahari. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir, mulai serius menggarap sektor pariwisata, untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pariwisata sudah mulai tersedia. Promosi dan lain-lain juga telah dilakukan.

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengembangan pembangunan sektor pariwisata berdasarkan perspektif *hexa helix* di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021. Penelitian perspektif *hexa helix* terbilang baru, di dalam kajian akademik dan teoritis. Selama ini yang cukup mengemuka adalah perspektif *penta helix*, yaitu lima unsur, terdiri dari; akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Adapun dalam perspektif *hexa helix*

ada unsur keenam. Unsur keenam ini para peneliti masih berbeda-beda di dalam mengungkapkannya. Penelitian ini mengungkap unsur keenam di dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep adalah unsur kesehatan (*health*). Hal ini didasarkan pada temuan selama pandemic Covid-19, sektor pariwisata nyaris “mati” akibat kesehatan masyarakat terganggu secara massal.

### **Potensi Pariwisata di Kabupaten Sumenep**

Kabupaten Sumenep yang secara geografis berada di ujung timur Pulau Madura, memiliki potensi wisata yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Selain itu, posisi Kabupaten Sumenep berada di antara segitiga Madura, Jawa dan Bali, yang biasa disebut sebagai segitiga emas pariwisata Indonesia (*Indonesian tourism golden triangle*). Pemerintah Kabupaten Sumenep, sedang berupaya melakukan upaya tersambungannya secara langsung Kabupaten Sumenep dengan Banyuwangi dan Bali, melalui transportasi udara. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi wisata di Kabupaten Sumenep, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memiliki beragam potensi wisata yang terdiri dari wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner dan lain-lain. Wisata budaya di Kabupaten Sumenep meliputi museum keraton Sumenep, masjid agung, makam raja-raja di Asta Tinggi, Asta Sayid Yusuf dan lain-lain. Wisata alam di Kabupaten Sumenep juga banyak tersebar di beberapa wilayah, baik yang berada di daratan maupun kepulauan. Wisata alam terdiri dari Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Pantai 9 di Pulau Gili Genting, Pantai Badur, Gua Pajuddan, Pantai Ponjug, Sumber Air Kiermata, Gua Kuning, Pantai Batu Guluk, Pantai Mamburit, terumbu karang di laut Pulau Saobi, Gua Pajuddan, Gunung Pasir Panaongan, Sungai Grujugan, Taman Laut dan Karang di Pulau Saor, serta Pantai Pasir Putih di Pulau Saebus, Kecamatan Sapeken. Sedangkan wisata buatan antara lain kolam renang TSI, Water Park Sumekar (WPS), Bukit Tinggi, dan Taman Tectona.

Ada pula wisata lain yang dibuat berdasarkan kalender wisata, terutama pada saat Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Pagelaran wisata yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, maupun masyarakat

secara umum yang didukung oleh pemerintah, berasal dari kalangan komunitas tertentu, seperti komunitas biker, komunitas pecinta burung dan hewan lain. Selain itu ada pula festival kuliner dan jajanan khas Kabupaten Sumenep (Sumenep, 2021).

**Gambar 1. Objek Wisata Gili Labak. Salah Satu Potensi di Kabupaten Sumenep.**



*(Sumber: Dokumentasi Peneliti, Oktober 2021).*

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut seiring dengan semangat para pengusaha dan masyarakat secara umum. Dalam tiga tahun terakhir banyak berdiri hotel dan penginapan baru, untuk berbagai segmen ekonomi, baik lokal maupun pendatang dari luar Sumenep. Kafe, restoran dan rumah makan berdiri di berbagai sudut kota, bahkan ada beberapa yang sudah berani buka di daerah pinggiran yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Pada tahun 2019 Hotel Bintang 3 dan Bintang 2 sudah mulai hadir di Sumenep sejak tahun 2019. Begitu pula Hotel Bintang 4 akan segera hadir, pembangunannya sudah dimulai pada tahun 2021. Pihak swasta kembali berinvestasi besar di Kabupaten Sumenep dengan membangun hotel bintang 4 bernama Luminor. Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang menjanjikan dalam jangka waktu panjang, khususnya untuk menarik berbagai masyarakat domestik maupun mancanegara berkunjung ke Kabupaten Sumenep. Pihak swasta mempercayai potensi wisata di Kabupaten Sumenep dapat berdampak pada keuntungan usaha (profit) dalam pembangunan hotel dan restoran.

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga optimis pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep juga akan terus berkembang, seiring dengan potensi wisata yang dimiliki, dan potensi ekonomi yang diperoleh oleh pengusaha yang menginvestasikan dananya di sektor pariwisata. Hal ini akan meningkatkan pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep dari sektor pariwisata. Hal tersebut dikemukakan oleh Bambang, Kasie Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sumenep.

*“Sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi dan menjanjikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Seperti halnya di saat pandemi saja Sumenep akan mulai membangun hotel bintang 4 yaitu Luminor. Ini berarti elektabilitas dari pertumbuhan ekonomi di Sumenep tetap menjanjikan. Pihak swasta atau investor masih percaya terhadap Sumenep untuk berinvestasi di Sumenep dengan ketelitian yang lebih dari sekadar data-data yang didapat dari dinas melainkan juga terjun ke lapangan secara langsung untuk membuktikan potensi-potensi yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, sampai hari ini terdapat potensi yang sangat menjanjikan untuk ke depannya dari sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep.” (Bambang, Kasie Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sumenep, pada 20 September 2021).*

## **Peran Enam Unsur Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep**

Pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep, tidak terlepas dari peran enam unsur yang terangkum dalam hexa helix; terdiri dari dunia pendidikan (*academic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media massa (*media*), dan kesehatan (*health*).

### **Unsur Pendidikan (*Academic*)**

Pengembangan pembangunan pariwisata yang menggunakan perspektif hexa helix, merupakan kerjasama yang melibatkan beberapa sektor dalam proses pengembangan pariwisata dengan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan terkait pembangunan pariwisata. Salah satu sektor yang memiliki peran yang turut serta dalam pengembangan pembangunan pariwisata adalah dunia akademik. Berdasarkan hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pihak akademisi yang pada saat itu diwakili oleh Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, menjelaskan bahwa merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam membantu pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, walaupun pemerintah kabupaten tidak secara jelas menggandeng perguruan tinggi untuk hal tersebut. Pihak akademisi dalam hal ini perguruan tinggi hanya dapat berupaya dengan melaksanakan penelitian tentang pariwisata/ kurikulum mata kuliah pembangunan pariwisata.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak akademisi, diharapkan terdapat koordinasi yang jelas dalam menindaklanjuti hasil penelitian dari masing-masing sektor. Terutama pelaku utama dari pariwisata seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata. Kebaharuan dari hasil penelitian, dapat menjadi masukan terhadap para pelaku industri pariwisata yang dapat diterapkan secara nyata. Dengan adanya inovasi pengadaan souvenir khas suatu daerah misalnya, di suatu destinasi wisata. Potensi yang ada di Kabupaten Sumenep tidak hanya terbatas pada keindahan alamnya saja, tetapi juga perlu adanya pengolahan kerajinan hingga menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi sekaligus menjadi suatu ikon oleh-oleh atau souvenir khas Kabupaten Sumenep.

*“Jadi tanggung jawab saya salah satunya pada saat melakukan penelitian penta helix, saya menyumbangkan kurikulum yang menjadi muatan lokal tetapi bukan muatan wajib yang mana saya berharap ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berasal dari desa yang sebenarnya punya potensi di desanya untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah pariwisata. Sehingga sumbangsib dari perguruan tinggi khususnya dari prodi Adminsitrasi Publik di FISIP Universitas Wiraraja yaitu mengeluarkan kurikulum dan merupakan tanggungjawab kami bahwa pariwisata ini merupakan sektor yang sebenarnya cukup memberikan pemasukan devisa, atau pendapatan daerah.” (Irma Irawati, Dekan FISIP pada saat Focus Group Discussion (FGD) di Sumenep, 17 September 2021).*

Kontribusi perguruan tinggi berupa kurikulum mata kuliah pembangunan pariwisata walaupun hanya sekadar menjadi muatan lokal dan bukan muatan wajib, juga merupakan upaya pihak akademik untuk memberi materi keilmuan bagi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensi wisata di daerah. Selain itu juga merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa pariwisata merupakan sektor yang memberikan masukan devisa dan pendapatan daerah. Dengan adanya pengetahuan tentang



pariwisata, para mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, diharapkan dapat membantu proses pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep.

### **Unsur Dunia Usaha (Business)**

Sektor bisnis (usaha) juga berperan penting dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur diperoleh penjelasan mengenai keterlibatan sektor bisnis dalam pengembangan sektor pariwisata. Menurut perwakilan dari BRI Cabang Sumenep, pihaknya memberikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *media branding*, serta membantu pembelajaran tata kelola keuangan bagi pelaku-pelaku wisata. Pihak BRI Sumenep menjelaskan bahwa:

*“Sebelum akhirnya terpilih Pantai Sembilan, pihak BRI Cabang Sumenep mendaftarkan Gili Labak dan Pantai Sembilan. Adapun terpilihnya Pantai Sembilan tersebut dikarenakan pada saat itu masih dikelola BUMDes. Sehingga seperti proses pembangunan pariwisata atau modal dari BUMDes untuk pembangunan pariwisata, BRI tidak menyediakan program bantuan untuk hal itu, hanya terbatas pada pemberian program CSR dan media branding (seperti papan nama), serta membantu pembelajaran tata kelola keuangan bagi pelaku-pelaku wisata.”* (Ferly Rizah, perwakilan BRI Cabang Sumenep, saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 17 September 2021).

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh BRI kepada pelaku wisata, merupakan program dengan beberapa rangkaian dari kantor wilayah hingga kantor cabang, dengan melihat beberapa objek wisata yang memiliki usaha promosi atau pemasaran serta penulisan berita atau informasi tentang wisatanya melalui media sosial. Adapun di tahun 2020, BRI Cabang Sumenep mendaftarkan Gili Labak dan Pantai Sembilan sebagai kandidat destinasi wisata penerima program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut. Diantara keduanya, yang akhirnya lolos menjadi penerima program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BRI yakni Pantai Sembilan yang pada saat itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bantuan berupa *media branding* juga dilakukan oleh BRI dalam membantu pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Media branding yang dimaksud, yaitu dengan pengadaan papan nama, seperti

yang terdapat di Pantai Sembilan. Selain itu, BRI Cabang Sumenep juga memberikan pengetahuan dan informasi sebagai inovasi terhadap pelaku wisata dalam proses penjualan tiket. Seperti yang terjadi di lapangan, penjualan tiket hanya dapat dibayar secara tunai. BRI Cabang Sumenep juga memberikan kemudahan berupa sistem pembayaran tiket yang dapat dilakukan melalui rekening dengan tetap tercatat secara otomatis oleh sistem.

### **Unsur Masyarakat (Community)**

Masyarakat (*community*) juga merupakan salah satu unsur dalam yang ada di dalam hexa helix. Masyarakat dapat berupa seseorang yang mengelola secara langsung sebuah destinasi wisata atau disebut pelaku industri wisata, atau seseorang/ kelompok orang yang membantu pengelolaan sebuah destinasi wisata di daerah atau desanya. Pada pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep menghadirkan perwakilan komunitas pelaku pariwisata Pantai Ekasoghi dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sema'an, sebagai bagian dari sektor masyarakat yang juga turut berperan dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Menurut pelaku wisata Pantai Ekasoghi, potensi wisata alam di Sumenep sangat melimpah namun belum didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Minimnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kepedulian terhadap proses pengelolaan kekayaan alam yang terdapat di sekitar, akhirnya berdampak pada pengembangan pembangunan pariwisata juga. Banyak pelaku wisata tak hanya komunitas dari Pantai Ekasoghi yang juga membutuhkan pelatihan dari lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata maupun perguruan tinggi, dengan program studi pariwisata. Sehingga dapat menarik pemuda-pemudi untuk mempelajari dan memiliki keilmuan tentang pembangunan pariwisata. Maka, tidak akan ada lagi permasalahan tentang kekayaan alam yang disia-siakan pada saat banyak sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola dengan baik.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan sebuah kelompok yang tugasnya mengenalkan potensi wisata yang ada di desanya, beranggotakan masyarakat asli berasal dari desa setempat. Seperti pokdarwis di Desa Sema'an ini yang memulai prosesnya dari nol, kini

mendapat pembinaan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep terkait dengan tugas dan tanggung jawab pokdarwis serta persiapan program-program kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pokdarwis untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke tempat wisata di desanya.

*“Kami membangun kafe di tengah sawah dengan nama pokdarwis hasil swadaya dan sebagian dibantu oleh pak kades, lalu banyak masyarakat sekitar bertanya apa itu pokdarwis.”* (Sunarto, Ketua Pokdarwis Desa Sema’an, pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, 17 September 2021).

Masih sedikit orang yang betul-betul memahami apa dan fungsi dari pokdarwis itu sendiri. Padahal untuk tugas dan fungsi keberadaan pokdarwis diantaranya, yaitu memperkenalkan desanya sendiri, mengembangkan dan memperkenalkan potensi seni dan budaya yang ada di desa seperti kerajinan-kerajinan khas yang diproduksi di desa, yang pada akhirnya dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi di desa. Pokdarwis Desa Sema’an ini juga telah memiliki *homestay* yang siap menjadi tujuan wisatawan. Pokdarwis yang merupakan suatu komunitas atau organisasi yang bersifat swadaya, memiliki banyak kesulitan. Seperti dana yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan bimbingan dari pihak akademisi dalam meningkatkan kapasitasnya di bidang pariwisata.

Berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan (*prokes*), Pokdarwis Desa Sema’an menuturkan bahwa hanya dapat menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang penerapan *prokes* dengan seadanya saja, seperti air tempat cuci tangan disediakan dengan menggunakan gentong dan alat pengukur suhu yang sederhana. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang seadanya ini, anggota Pokdarwis Desa Sema’an berharap akan ada bantuan dari pihak dinas dan akademisi dalam membantu penyempurnaan penerapan *prokes* di desanya sesuai *standart*.

Selain itu juga berharap adanya program bantuan yang nantinya dikhususkan kepada komunitas pelaku pariwisata, tidak hanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dianggap sudah biasa sebagai kredit yang diberikan kepada perorangan yang memiliki usaha, sedangkan pokdarwis merupakan sebuah kelompok. Anggota Pokdarwis Desa

Sema'an mengungkapkan telah ada peranan dinas pariwisata yang ikut andil dalam perkembangan keberadaan pokdarwis tersebut. Seperti dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam membantu pengadaan pokdarwis dari nol, bahkan juga dilakukan proses pengawasan atau *controlling* (melalui status di *whatsapp*). Namun, untuk dukungan berupa dana masih belum ada dari pihak dinas. Selain itu juga berharap akan mendapat pembinaan juga selain hanya dari dinas pariwisata dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pokdarwis yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya Desa Sema'an, dengan harapan nantinya dapat menjadi pokdarwis yang berkembang dan maju seperti di wilayah Jawa.

Pokdarwis yang sejak awal hanya dibekali oleh pembinaan-pembinaan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, serta tidak adanya pemberian modal tunai secara langsung dalam membangun pariwisata. Tetapi, sebagian pokdarwis tetap berusaha membangun pariwisata dengan optimis dapat berkembang dan membantu pertumbuhan ekonomi baik pokdarwis itu sendiri maupun pada desa atau kabupaten.

### **Unsur Pemerintah (Government)**

Pemerintah merupakan sektor yang paling banyak berperan dalam pengembangan pembangunan pariwisata. Pemerintah, selain merumuskan kebijakan-kebijakan dalam membantu mengembangkan pariwisata juga berperan untuk menyerap berbagai aspirasi dari berbagai kalangan sebagai masukan dan bahan dalam merumuskan program kegiatan yang menunjang pengembangan pembangunan pariwisata. Seperti salah satunya melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak akademisi, dapat menjadi masukan secara teoritis dan praktis dalam merumuskan hingga mengeksekusi program kegiatan yang hasilnya secara langsung menysasar pada masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, pihak pemerintah diwakili oleh Kasie Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sumenep dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Sumenep, Disbudparpora telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)

pramuwisata untuk memberikan pelayanan yang berstandarisasi, berdasarkan kompetensinya ada tingkatan muda dan madya yang di evaluasi setiap tiga tahun sekali. Selain itu juga terdapat peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menghadapi pemulihan sektor pariwisata selama masa pandemi khususnya pada sektor perhotelan. Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 50 orang pramuwisata, dengan rincian tahun 2021 sebanyak 30 dan tahun 2022 sebanyak 20 orang. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk dapat mengisi lapangan pekerjaan yang ada di hotel di Kabupaten Sumenep yang sudah berbintang. Hotel berbintang ini sudah mau menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sumenep dengan syarat sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, maka nanti kita memfasilitasi itu dengan pelatihan bidang perhotelan.

Secara konsep ketika membahas tentang pemerintah (*government*), maka disitu akan melekat kewenangan pemerintah yang salah satunya yaitu regulasi dan legal. Jadi tidak perlu dicantumkan pun adanya unsur legal dengan adanya *government* sebenarnya sudah masuk didalamnya. Namun boleh jika aspek yang dimaksud adalah arah kebijakannya. Seperti dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bidang kepariwisataan ada dua pasal krusial yang dihapus dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang krusial ini hampir yang menyentuh seluruh aspek. Jadi pembangunan nasional dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Riparnas) sampai dengan Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (Riparkab) Tahun 2018.

Di Kabupaten Sumenep telah memasuki tahap kedua karena di Riparkab bertahap dari 2018 sampai 2020 yang merupakan tahap pertama. Sedangkan dari 2021 sampai 2023 itu tahap kedua, akhirnya dari Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (Riparkab) yaitu pada tahun 2025. Hasil dari Riparkab tahap kedua tersebut memerlukan adanya evaluasi dan penelitian-penelitian.

Pernah ada fotografer yang juga merupakan arsitek, melihat beberapa bangunan di Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa miniaturnya sangat bagus, kota kecil namun menyimpan harta karun dari aspek arsitekturnya. Seperti Masjid Agung dan benteng di Kalianget yang telah dijadikan sebagai cagar budaya. Namun seringkali masyarakat belum mengetahui hal tersebut. Informasi terkait dengan

bidang kepariwisataan itu perlu dapat tersampaikan agar koneksi jaringan dapat masuk.

Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memiliki anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dijadikan salah satu instrumen di dalam pembangunan sektor pariwisata. Meski begitu, ada kesan bahwa anggaran yang ada selalu disampaikan sangat terbatas. Termasuk anggaran untuk membangun fasilitas di tempat wisata religi. Perbaikan fasilitas di tempat-tempat wisata religi perlu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada para wisatawan religi yang datang ke Sumenep. Pemasukan dari wisatawan religi tidak bisa terlalu diandalkan, sebab mereka rata-rata dalam kondisi keterbatasan ekonomi.

Hal tersebut sebagai bentuk stimulus dari anggaran pemerintah. Sebagaimana yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial dan hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan stimulus untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan tujuan agar masyarakat dapat berkembang atau berjalan, yang kemudian diberikan atas pertimbangan-pertimbangan yang apakah itu termasuk pada urusan pemerintahan wajib atau termasuk pada urusan pemerintahan pilihan.

Meski begitu, pemerintah memiliki kendala tersendiri di dalam merealisasikan bantuan kepada banyak pihak, terutama bantuan dalam bentuk dana. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis nirlaba, sukarela, dan terdaftar. Maka prinsip bansos (diberikan kepada perorangan atau individu) atau hibah (diberikan kepada organisasi kemasyarakatan). Misalnya sebuah lembaga berorientasi pada laba (*profit oriented*) dan memiliki laporan keuangannya. Maka lembaga tersebut tidak akan mendapat hibah, sebab aturan pedoman pelaksanaan hibah itu tidak dapat memperoleh hibah.

Sedangkan apabila sebuah lembaga yang tidak berorientasi pada laba atau keuntungan maka dapat memperoleh hibah atau bantuan tersebut. Sama halnya juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pariwisata, olahraga, kebudayaan dan kepemudaan juga perlu dipilah antara *profit oriented* dan nirlaba untuk menentukan lembaga mana yang dapat memperoleh hibah, tetapi bukan berarti kemudian akan

dibiarkan. Namun akan ada kegiatan pembinaan seperti mengadakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## Unsur Media

Media menjadi salah satu unsur yang sangat berperan terhadap pengembangan pembangunan pariwisata khususnya di Kabupaten Sumenep. Hal ini bisa terjadi pada kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran terhadap destinasi wisata yang ada. Baik dengan publikasi secara audio, visual, maupun audio visual yang dikemas dengan sangat baik untuk menarik wisatawan berkunjung. Pada *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Sumenep, salah satu wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep yang hadir, mengungkapkan bahwa sering kali media di Kabupaten Sumenep menulis beberapa berita dengan konten yang kurang baik sebagai bentuk kritik dan bahan evaluasi terhadap para pelaku wisata atau pemerintah kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata. Walaupun demikian, dalam proses penulisan berita khususnya tentang pariwisata baik berupa kritik, saran maupun pujian terlebih dahulu dilakukan penyaringan terhadap kalimat-kalimat yang pantas dan tidak pantas untuk diberitakan.

Kritik serta saran kerap kali diberitakan agar dapat menjadi bahan untuk membantu pengembangan pembangunan pariwisata. Seperti dengan perlunya *branding* pada setiap destinasi wisata yang ada khususnya pada destinasi dengan objek yang sama. Seperti halnya Pantai Lombang dan Pantai Slopeng, perlu ada kekhasan yang dapat membedakan diantara keduanya walaupun dengan objek yang sama yaitu pantai. Dengan *branding* tersebut dapat menarik pengunjung untuk berkunjung ke masing-masing wisata yang ada tanpa merasa bosan dan jenuh. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh media juga dapat menutupi beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam pariwisata di Kabupaten Sumenep, seperti akses ke lokasi pantai Gili Labak yang masih banyak keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarananya.

*“Selain itu juga yang kerap kali menjadi sebuah kebohongan media dalam mempromosikan wisata di Kabupaten Sumenep yakni terkait sarana dan prasarana atau transportasi menuju lokasi wisata. Masih ada keterbatasan sarana dan prasarana untuk akses menuju lokasi wisata, seperti contoh akses ke lokasi pantai Gili Labak”.* (Samsul

Arifin, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021).

### Unsur Kesehatan (*Health*)

Unsur kesehatan (*health*) sebelumnya tidak menjadi perhatian para ahli maupun praktisi pada saat membahas pembangunan sektor pariwisata. Namun unsur kesehatan ternyata memiliki peran penting di dalam pembangunan sektor pariwisata. Hal ini terbukti pada saat terjadi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, dan Kabupaten Sumenep, sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan drastis.

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sumenep Tahun 2015–2020**

Tahun	Jumlah Destinasi Wisata	Jumlah wisatawan		Total Jumlah Wisatawan
		Mancanegara	Domestik	
2015	9	143	851.756	851.899
2016	20	1.332	854.614	855.946
2017	22	4.036	1.047.109	1.051.145
2018	26	2.996	1.457.749	1.460.745
2019	30	1.612	1.496.874	1.498.486
2020	29	58	208.035	208.093

(Sumber: Data Disbudparpora Kabupaten Sumenep, 1 November 2021).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 mengakibatkan dampak berkelanjutan terhadap kondisi pariwisata di Kabupaten Sumenep. Selain berdampak terhadap penurunan jumlah kunjungan wisata selama hampir dua tahun. Ditutupnya beberapa destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep seperti Pantai Lombang, Pantai Slopeng dan Museum Keraton Sumenep, juga turut berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep yang berasal dari sektor pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, potensi pariwisata di Kabupaten Sumenep turut berkontribusi terhadap pemasukan PAD Kabupaten Sumenep, khususnya seperti retribusi wisata yang dikelola oleh Pemkab Sumenep yaitu Pantai Lombang, Pantai Slopeng dan Museum Keraton Sumenep. Berikut data PAD Kabupaten Sumenep yang berasal dari sektor pariwisata.



**Tabel 2. Realisasi Penyetoran Retribusi Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Museum Keraton, Event Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	280.000.000,00	313.703.000,00
2	2017	322.000.000,00	367.267.000,00
3	2018	400.000.000,00	588.810.000,00
4	2019	425.845.000,00	699.212.050,00
5	2020	330.000.000,00	177.720.050,00

*(Sumber: Data Disbudparpora Kabupaten Sumenep, 1 November 2021).*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep dari sektor pariwisata. Khususnya destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Sumenep seperti Pantai Lombang, Pantai Slopeng dan Museum Keraton. Tidak hanya mengalami penurunan dari jumlah penyetoran retribusi dari tahun 2016 hingga 2019, di tahun 2020 realisasi penyetoran retribusi pariwisata juga hanya mampu mencapai angka 53% dari target yang direncanakan.

Pemulihan sektor pariwisata menjadi sebuah prioritas dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sumenep. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pariwisata di tahun 2020 pada saat pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis, tidak serta merta menghilangkan eksistensi daripada potensi wisata di Kabupaten Sumenep.

Seiring menurunnya jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumenep, banyak pelaku wisata berharap agar Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan izin untuk kembali membuka berbagai destinasi wisata seperti sedia kala. Hal itu juga didukung dengan pernyataan oleh Masdawi selaku anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang dilansir dari [infopublik.id](http://infopublik.id).

*“Meski masih berisiko di masa pandemi, tapi setidaknya dengan wisata dibuka bisa menyelamatkan sektor perekonomian. Kita tahu Covid-19 masih belum hilang. Tapi di sisi lain pemasukan perekonomian juga penting. Nah, sektor wisata inilah yang dinilai cepat untuk mendongkrak ekonomi.”* (Masdawi, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep).

Maka, agar dapat memaksimalkan pengoperasian destinasi wisata seperti sedia kala di masa pandemi juga perlu adanya peningkatan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Melalui produk dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*), penerapan protokol kesehatan telah termasuk di dalamnya. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep mengarahkan seluruh pelaku wisata yang hendak mengoperasikan kembali usaha wisatanya di masa pandemi perlu melakukan pendaftaran CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*). Setelah berbagai pelaku wisata mendaftarkan usaha wisatanya untuk mendapatkan sertifikasi CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*), pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengoperasikan kembali destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep dalam rangka memperbaiki sektor perekonomian melalui sektor pariwisata. Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Sumenep juga dilakukan untuk menerapkan CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*) dan protokol kesehatan semakin ketat dan disiplin.

*“Untuk beberapa kebijakan maupun dasar hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep dalam memulihkan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep selama masa pandemi, yaitu kembali pada penerapan proses yang lebih diperketat lagi termasuk juga mewajibkan seluruh pelaku wisata atau berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sumenep mendaftarkan destinasi wisatanya dalam program CHSE. Termasuk kalau disparbud mengadakan acara sendiri, walaupun ada karyawan yang tergabung di tim satgas, tetap saja disparbud meminta izin kepada tim satgas untuk mengadakan acara terkait penerapan prosesnya.”* (Bambang, Kasie Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sumenep pada *Focus Group Discussin* (FGD) di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021).

Usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian melalui sektor pariwisata dapat tercapai secara optimal. Apabila pemerintah dapat mengendalikan penyebaran Covid-19. Keberlanjutan industri pariwisata selama masa pandemi sangat bergantung pada kedisiplinan penerapan sektor kesehatan. Pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menekan percepatan penyebaran Covid-19. Salah satu program yang menunjang pelaksanaan pariwisata di masa pandemi covid-19 adalah menerapkan CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*).

Terdapat dua tempat di Kabupaten Sumenep yang telah mendapatkan sertifikasi menerapkan CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*), yaitu hotel Kaberez dan Pantai Lopek Pulau Gili Iyang. Sedangkan destinasi wisata lainnya masih dalam proses pendaftaran maupun verifikasi untuk memperoleh sertifikasi CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*) tersebut. Walaupun demikian, hampir seluruh destinasi wisata di Kabupaten Sumenep seperti di Desa Sema'an yang memiliki suatu wisata pedesaan atau agrowisata. Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis Desa Sema'an juga telah menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

Pihak Disbudparpora Kabupaten Sumenep, mengakui bahwa kegiatan pengembangan pembangunan pariwisata khususnya selama masa pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah. Sebuah dilema terjadi ketika hendak berdamai dengan pandemi untuk tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berhenti beroperasi maka akan berdampak terhadap penurunan eksistensi wisata maupun pendapatan daerah, sedangkan jika memaksakan diri untuk tetap beroperasi dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah terdampak Covid-19.

Pemerintah berupaya untuk keluar dari krisis kesehatan yang berdampak pada sektor pariwisata dengan merumuskan program yang dapat membantu kegiatan usaha pariwisata tetap berjalan sedia kala namun dengan tetap mengendalikan percepatan penyebaran Covid-19. Program CHSE (*Cleanlines, Health, Safety, and Environment*) yang digagas oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, disambut oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Disbudparpora Kabupaten Sumenep, dengan menggencarkan sosialisasi kepada pelaku pariwisata terkait program tersebut. Supaya pelaku industri pariwisata bisa segera membuka usahanya dengan tetap juga mengendalikan penyebaran Covid-19 dan memperhatikan lingkungan agar tidak rusak.

Salah satu wisata di Kabupaten Sumenep yang sudah mulai buka selama 24 jam adalah wisata religi, Asta Yusuf. Para wisatawan yang sebagian besar merupakan wisatawan lokal yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, diperkenankan untuk datang ke Asta Yusuf dalam waktu 24 jam, dengan catatan, pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Untuk menghindari adanya kerumunan yang terjadi, dan supaya para pengunjung penerapan jaga jarak (*physical or social distancing*)

Polsek Talango sering melakukan pemantauan. Selain itu, Polsek Talango juga memberlakukan wajib vaksin bagi calon pengunjung atau wisatawan Asta Yusuf. Dengan kebijakan tersebut, selain dapat tetap mengoperasikan destinasi wisata sebagaimana biasanya juga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kekebalan masyarakat (*herd immunity*).

*“Kemarin terakhir saya mengecek di Asta Yusuf itu banyak, dari Situbondo dan Bondowoso. Saya lihat disana prosesnya sudah ada tetapi kembali lagi mungkin untuk menjaga jarak ini agak sedikit tidak terkontrol mungkin apakah karna mereka itu bersama keluarganya. Tetapi tadi ada dari Polsek Talango itu sudah melakukan sosialisasi untuk yang masuk Talango itu harus Vaksin dalam rangka mempercepat herd immunity. Secara tidak langsung tingkat kesadaran masyarakat terhadap vaksin ini juga mempengaruhi pembangunan pariwisata, semisal target herd immunity secara nasional ini belum tercapai, maka kebijakan pemerintah ini ke bawah juga akan berbeda.”* (Bambang, Kasie Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Sumenep pada *Focus Group Discussin* (FGD) di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021).

**Gambar 2. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang Dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021.**



*(Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 17 September 2021).*

## **Peran Enam Unsur (*Hexa Helix*) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kota Batu**

Kota Batu, Jawa Timur merupakan daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan sektor pariwisatanya. Sejak lima tahun terakhir, Kota Batu, Jawa Timur yang terkenal dengan pesona wisata alamnya, telah berhasil menarik wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Potensi wisata alam di Kota Batu dikemas semenarik mungkin serta dikembangkan secara optimal untuk selalu menarik wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Batu juga membutuhkan peranan dari banyak unsur atau sektor yang dapat terus berkontribusi dan berpartisipasi mengembangkan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Adapun unsur atau sektor yang dibutuhkan peranannya dalam perspektif *hexa helix* yang terdiri atas unsur *academic*, *business*, *government*, *community*, *media*, dan *health*.

### **Unsur Pendidikan (*Academic*)**

Unsur akademik atau dunia pendidikan juga memiliki peran penting di dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Batu pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Kota Batu, pada tanggal 01 Oktober 2021. Aktivitas sektor pariwisata yang ada di Kota Batu, banyak sekali melibatkan dunia akademik, khususnya perguruan tinggi yang banyak tersebar di Malang, Jawa Timur. Ada lima aktivitas pariwisata yang melibatkan peranan akademisi, yaitu invensi, identifikasi, pemingkiaan isu, promosi, dan pembinaan.

### **Penemuan Baru (*Invention*)**

Akademisi berperan untuk menganalisis kondisi yang tengah terjadi hingga dapat mencari celah sebagai alternatif peluang menemukan temuan-temuan baru khususnya yang menjadi daya tarik wisatawan. Seperti pada saat pandemi, perlu adanya ide atau gagasan baru yang dapat memulihkan sektor pariwisata khususnya dalam mengembalikan minat wisatawan untuk berkunjung. Akademisi dapat menemukan ide, gagasan dan temuan baru dengan melakukan penelitian ataupun kajian-kajian secara konseptual terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dengan memperhatikan sektor pariwisata di dalamnya.

## **Identifikasi (*Identification*)**

Kalangan perguruan tinggi (akademik) melakukan berbagai penelitian atau kajian secara mendalam terhadap berbagai fenomena, isu dan peristiwa yang ada. Penelitian yang dilakukan mencakup berbagai hal, termasuk juga kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan menjadi bahan rujukan pemerintah, seperti upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam memulihkan sektor pariwisata di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan juga berbagai hal termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari adanya potensi kebaruaran yang dapat dilanjutkan pada tahap pembangunan.

## **Pembingkaiian (*Framming*)**

Pariwisata tidak sekadar bagaimana menjalankan usaha pariwisata, namun juga perlu adanya pengemasan terhadap objek wisata yang hendak dijual. Proses pembingkaiian isu yang dikemas dengan sangat baik dalam menggambarkan, menceritakan dan secara tidak langsung memasarkan wisata dengan segala kelebihan-kelebihan baik dari keindahan, kenyamanan maupun keamanannya. Aktivitas tersebut juga perlu campur tangan dari pihak akademisi, sebab akademisi yang telah melakukan analisis dan kajian yang mendalam, pasti akan mudah dipercayai oleh publik terhadap isu-isu yang disampaikan terkait dengan pariwisata terkait. Hal ini bisa dilakukan oleh kalangan akademik melalui publikasi hasil penelitian, pengabdian, maupun pada kegiatan seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang diikuti.

## **Promosi (*Promotion*)**

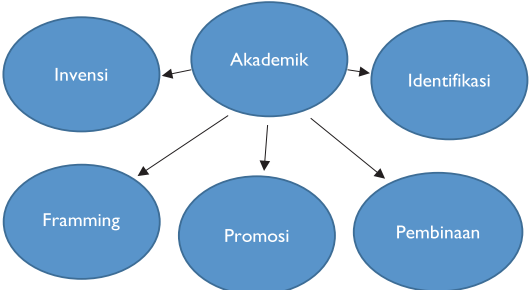
Kalangan akademisi yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik memiliki kesempatan yang besar untuk mempromosikan berbagai objek wisata, kepada kolega, sahabat, keluarga, dan setiap orang yang dikenal, baik secara formal maupun nonformal. Hal tersebut memungkinkan bagi kalangan akademisi untuk terlibat mempromosikan potensi wisata.

## **Pembinaan (*Founding*)**

Peranan akademisi dalam membantu pengembangan pembangunan pariwisata yaitu pembinaan. Titik fokus dari pembinaan terdiri atas inovasi, kreasi dan transformasi. Pembinaan tersebut ditujukan untuk

dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat berinovasi dan berkreasi semaksimal dan seoptimal mungkin dalam mengembangkan pembangunan pariwisata khususnya di Kota Batu. Kegiatan pembinaan yang dilakukan kalangan akademisi di Kota Batu, melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari berbagai program studi (Prodi) dan perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, Jawa Timur.

**Gambar 3. Peran Unsur Akademik Dalam Pembangunan Pariwisata.**



(Hidayaturrahman, et al, 2021)

**Unsur Pengusaha (Business)**

Sektor usaha (*business*) memiliki peran yang penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Ada lima aktivitas yang menjadi peran dari pihak pengusaha.

**Membangun Destinasi Wisata**

Sebagai pelaku (*actor*), dunia usaha memiliki peran penting di dalam membangun berbagai destinasi wisata. Dengan modal yang dimiliki pengusaha memiliki peran penting di dalam membangun objek wisata di berbagai lokasi dan berbagai jenis usaha. Baik dalam bentuk usaha besar maupun usaha kecil, pengusaha memiliki peran sangat besar dengan dana yang dimiliki, untuk membuka objek wisata.

**Menciptakan Profit**

Dunia usaha dalam membuka usahanya memang berorientasi pada keuntungan (*profit*). Dunia usaha yang menciptakan profit tidak berarti keuntungan pada dirinya semata-mata, namun juga pada aspek daerah. Bersamaan dengan pemasukan yang diterima, ada kewajiban yang harus disetorkan kepada daerah, baik berupa pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya, sehingga profit yang diperoleh oleh dunia

usaha berdampak positif bagi daerah. Pajak dan retribusi yang dibayar oleh dunia usaha masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan yang disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

### **Membangun Sarana Prasarana**

Dunia usaha yang membuka usahanya di sektor pariwisata tidak hanya membangun objek wisatanya semata, namun juga membangun berbagai fasilitas penunjang dan sarana serta prasarana yang menuju dan berada di sekitar lokasi wisata. Hal tersebut tentu saja memiliki keuntungan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja juga berdampak positif bagi pembangunan secara umum. Terlebih bagi usaha sektor pariwisata skala besar yang membangun usahanya secara paket. Maka dampak positif sangat banyak terhadap pembangunan. Mulai dari objek wisata, hotel, restoran dan lain-lain. Namun banyak juga dunia usaha yang belum memberlakukan paket pada sektor wisata yang dikelola. Hal ini yang terus didorong oleh Pemerintah Kota Batu ke depan.

*“Pemaketan di Kota Batu belum optimal untuk bergulir ke sektor yang lain, seperti wisatawan yang berkunjung ke Batu namun menginapnya di Malang.”* (Perwakilan Bappeda Kota Batu, *Focus Group Discussion* (FGD), di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

### **Promosi**

Mempromosikan wisata pada satu sisi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah secara umum. Namun pengelola wisata yang dimiliki oleh pengusaha secara otomatis juga akan mempromosikan dan memasarkan usaha yang dikelola, supaya laku dan didatangi banyak pengunjung. Dalam konteks ini, sesungguhnya dunia usaha telah turut serta berperan dalam mempromosikan wisata di Kota Batu, secara khusus, usaha yang dikelola.

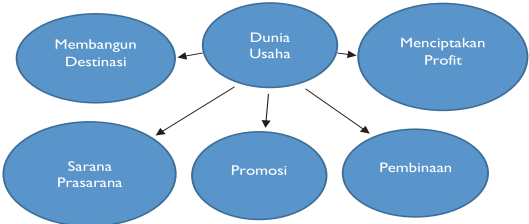
### **Pembinaan**

Dunia usaha yang menjalankan usaha di sektor pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya. Melalui karyawan dan tenaga kerja yang dipekerjakan, maka pengusaha akan membuat layanan usahanya sebaik dan sebagus mungkin. Untuk hal tersebut, maka pengusaha akan mendidik dan melatih karyawan yang profesional



pada bidang masing-masing. Hal tersebut berarti dunia usaha memiliki peran di dalam membina tenaga kerja, yang sebagian juga merupakan warga sekitar tempat usaha. Selain itu, dunia usaha memiliki mitra usaha sebagai pemasok (*supplier*) berbagai kebutuhan untuk usaha yang dikelola. Kepada pemasok barang, dunia usaha memberlakukan standar tertentu terhadap barang yang dipasok. Hal tersebut secara tidak langsung juga memberi fungsi pemberdayaan dan pembinaan kepada warga sekitar yang memasok barang kepada pengusaha sektor wisata.

**Gambar 4. Peran Dunia Usaha Dalam Pembangunan Pariwisata.**



(Hidayaturrahman, et al, 2021)

**Unsur Pemerintah (Government)**

Pemerintah merupakan unsur utama yang banyak berperan dalam pengembangan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Ada enam peran atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah (*government*) di dalam pembangunan sektor pariwisata.

**Pemberdayaan SDM**

Di dalam membangun sektor pariwisata, Pemerintah Kota Batu memiliki peran dan tanggung jawab di dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kota Batu, melalui pelatihan yang dilakukan kepada para pelaku wisata, maupun warga yang mau terlibat di dalam sektor pariwisata. Selain itu Pemerintah Kota Batu juga membuat strategi pengembangan desa mandiri, dengan mewajibkan setiap desa memiliki produk unggulan pada masing-masing desa, yakni dengan memanfaatkan berbagai *stakeholder* yang ada berdasarkan konsep *hexa helix*.

**Identifikasi**

Pemerintah Kota Batu terus melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi wisata yang ada. Bila ada yang perlu didampingi, maka dilakukan pendampingan. Salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata

dengan memfasilitasi pembentukan desa wisata melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung, memfasilitasi masyarakat dengan dunia usaha melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk selanjutnya menyusun pedoman desa wisata agar pembangunan desa wisata bisa sinergi dengan pemanfaatan wilayah kota dan tidak mengesampingkan pelestarian lingkungan. Dinas Pariwisata juga berperan untuk mencari pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk desa wisata disamping juga mendatangkan kunjungan ke desa wisata melalui event-event kebudayaan dan pariwisata.

### **Pembangunan Objek Wisata**

Pemerintah Kota Batu secara langsung terlibat di dalam membangun sektor pariwisata. Ada tiga model pembangunan pariwisata yang dikembangkan di Kota Batu.

*Pertama*, model kolaborasi. Dalam hal ini, ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Salah satu contoh model kolaborasi ini adalah tempat wisata Batu Night Spektakuler (BNS). Lahan tempat wisata ini dimiliki oleh pemerintah desa, kemudian disewakan kepada swasta, yang kemudian dibangun menjadi wahana bermain keluarga.

*Kedua*, murni swasta. Pembangunan model ini murni dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah hanya memberi fasilitas dan pelayanan berupa perijinan dan lain-lain, sehingga objek wisata bisa berjalan. Contoh objek wisata model ini adalah Jatim Park.

*Ketiga*, murni swadaya. Pembangunan model ini dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, baik oleh komunitas tertentu maupun oleh kelompok tertentu di masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi perijinan dan lain-lain. Biasanya yang dikelola oleh masyarakat adalah wisata bernuansa alam. Salah satunya adalah “Bukit Cinta.” Selain itu, “Selecta” juga dibangun dan dikelola oleh masyarakat.

**Gambar 5. Model Pembangunan Pariwisata di Kota Batu**

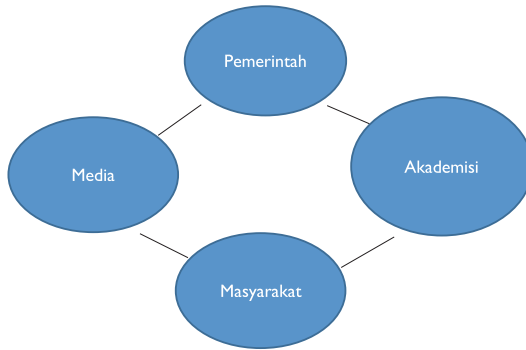


*(Hidayaturrahman, et al, 2021)*

## Framming

Pemerintah Kota Batu juga melakukan pemingkaian isu (*framing*) terhadap berita pariwisata. Banyak daerah di Indonesia yang menjual potensi wisata yang hampir sama, bahkan lokasinya juga tidak jauh atau berdekatan. Diperlukan adanya pemingkaian terhadap isu pariwisata yang ada, sehingga mampu menciptakan opini positif terhadap sektor pariwisata yang ada. Termasuk menciptakan kesan sebagai tempat wisata yang positif, aman dan nyaman. Hal ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan media dan akademisi juga masyarakat secara umum.

Gambar 6. Model *Framming* Kolaborasi di Kota Batu



(Hidayaturrehman, et al, 2021)

## Promosi

Salah satu promosi yang terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Batu adalah wisata paket. Orang yang wisata ke Kota Batu melakukan semua hal di Kota Batu, baik wisata, kuliner, menginap maupun belanja di Kota Batu.

## Branding

Kegiatan *branding* yang dilakukan adalah memfokuskan wisata di Kota Batu sebagai wisata alam dan budaya. Nilai-nilai tradisi dan lain-lain kemudian diangkat ke *event* dan dikolaborasikan dengan kelompok kesenian, sehingga menjadi keunikan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke kota Batu.

## Unsur Komunitas (Community)

Masyarakat memiliki peranan yang sangat signifikan dalam

pembangunan dan pengembangan potensi wisata di Kota Batu. Bila dipetakan, peran masyarakat tersebut mencakup:

1. Menyampaikan aspirasi terkait dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat seputar pembangunan destinasi wisata yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Membantu proses pembangunan dan pengembangan pariwisata.
3. Bertukar pikiran dan berbagi ilmu secara konseptual maupun praktik.
4. Peningkatan isu, pemasaran dan promosi wisata.

Salah satu perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang hadir pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu menyebut bahwa masyarakat memiliki peran penting di dalam menumbuhkan potensi wisata di Kota Batu. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya potensi wisata, terutama berbasis alam di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Bumiaji, yang bila diidentifikasi ada sekitar 31 destinasi wisata yang ada. Beberapa diantaranya merupakan wisata pertanian dan alam. Pada saat ini salah satunya yang sedang viral seperti jambu kristal, petik apel, dan petik jeruk.

*“Setiap tahunnya bertambah dua destinasi wisata yang semakin dikembangkan dengan adanya sinergitas dari berbagai pihak di desa Bumiaji itu sendiri seperti pemerintah desa maupun pemuda-pemuda desa.”* (Perwakilan Pokdarwis Bumiaji, saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

**Gambar 7. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu**



*(Hidayaturrahman, et al, 2021)*

## Unsur Media (Media Massa)

Media massa memiliki peran penting di dalam pembangunan sektor pariwisata di Kota Batu. Tidak sekadar mewartakan akan tetapi juga mengedukasi, karena media tidak hanya berinteraksi dengan pihak pengelola pariwisata tetapi juga berinteraksi dengan wisatawan. Media juga berperan mengawasi kebijakan dan yang terakhir adalah dikarenakan memang ada peran bisnis pula yang menggerakkan perekonomian. Dinas pariwisata sendiri melakukan kerjasama dengan media dalam hal pewartaan terkait pariwisata, dalam setiap *event* besar pariwisata, pihak media selalu dilibatkan untuk dapat meliput sebagai berita.

Peran media dalam mengedukasi, terlihat dari interaksi dengan pengelola pariwisata dan wisatawan. Media juga memiliki pengetahuan terkait kebijakan yang ada sehingga media juga menjadi pengantar antara pemerintah dengan pengelola terkait edukasi kebijakan yang ada. Karena terkadang ada beberapa kebijakan yang sosialisasinya tidak menyentuh pengelola pariwisata. Terkait interaksi dengan wisatawan, media menjadi promotor atas wisata-wisata yang ada di Batu. Misalnya pada saat ada wisatawan yang kecewa pada tempat wisata yang kondisinya tidak sesuai dengan yang diberitakan, maka media memberi pilihan lokasi wisata lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terkait kebijakan, salah satu peran media yang cukup krusial, karena pariwisata juga memiliki dampak sosial. Beberapa konflik kerap terjadi konflik lahan dan konflik kepentingan dan hal itu diberitakan sebagai fungsi kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dikritisi oleh masyarakat. Disisi lain pengembangan pariwisata juga berdampak pada penyusutan sektor pertanian, berdasar sensus pertanian pada 2003, luas lahan pertanian di Batu seluas 2.681 hektar kemudian dalam 10 tahun menyusut sebanyak 11,5% menjadi 2.373 hektar. Jumlah petani pun menyusut dari 2003 sebanyak 19.346 rumah tangga dan menyusut pada 2013 menjadi 17.358 rumah tangga. Saat ini kolaborasi untuk menjadikan pertanian sebagai wisata.

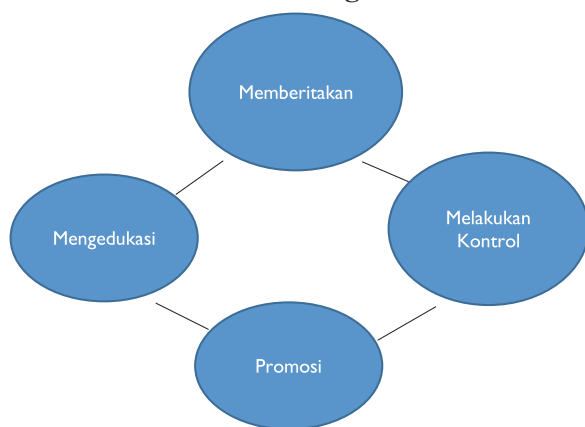
Kemudian berkaitan peran bisnis media, karena media merupakan perusahaan dan membutuhkan bisnis, media yang bagus, bisnisnya juga harus bagus. Dengan bisnis yang baik media bisa terus berjalan. Media saat ini menjalin kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah,

komunitas dan lain-lain untuk dapat saling menguntungkan, untuk mendapatkan pemasukan dengan melalui pemberitaan.

Peliputan potensi wisata di Batu merupakan inisiatif sendiri dari media, karena sektor wisata adalah konten menarik untuk dinikmati terutama media TV yang menampilkan berita secara visual bagi pembaca ataupun penonton berita. Media koran dan portal berita *online* pun membutuhkan berita supaya ada pasokan informasi dalam portalnya. Sehingga saat dalam situasi tidak ada peristiwa yang bisa diliput, spot wisata menjadi solusi untuk dapat diliput oleh media. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata sendiri biasanya dilakukan saat ada *event-event* tertentu saja.

*“Ada empat poin penting peran media dalam pembangunan pariwisata.”* (Beni Indo, perwakilan media dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang Raya, pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

#### **Gambar 8. Peran Media Dalam Pembangunan Pariwisata di Kota Batu**



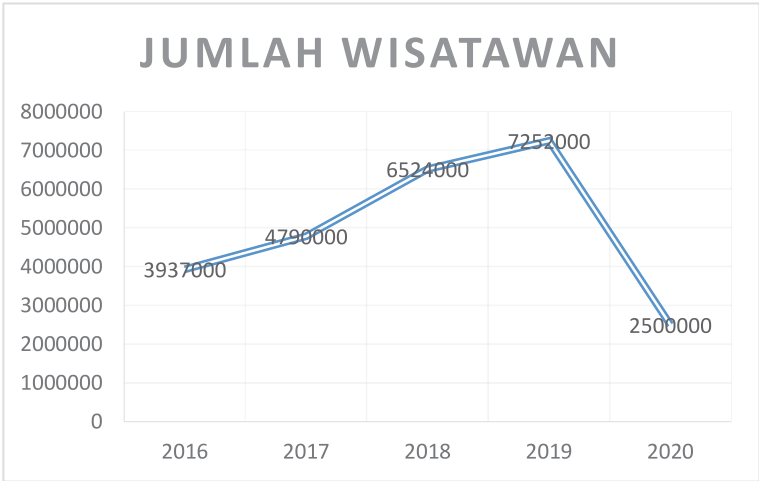
*(Hidayaturrahman, et al, 2021)*

#### **Unsur Kesehatan (Health)**

Unsur kesehatan (*health*) juga menjadi bagian penting di dalam pembangunan sektor pariwisata. Pada saat semua sektor tetap berjalan secara normal, baik akademik, media, komunitas, pemerintah, dan bisnis, namun kesehatan mengalami masalah, maka wisatawan akan berkurang drastis. Hal tersebut juga pada sektor wisata di Kota Batu, Jawa Timur. Karakteristik wisatawan Kota Batu sebagian besar adalah wisatawan domestik, berbeda dengan wisatawan Bali yang sebagian besar adalah wisatawan mancanegara.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu cukup tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Batu, Jawa Timur sejak tahun 2016. Puncaknya, pada tahun 2019, pengunjung ke Kota Batu hampir mencapai angka 10 juta. Namun pada saat pandemi melanda, pada tahun 2020, jumlah wisatawan turun drastis, hingga hanya 2,5 juta wisatawan.

**Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Batu Tahun 2016–2020**



(Sumber: Bappeda Kota Batu, 4 Oktober 2021).

Menurut data yang disajikan oleh perwakilan media yang hadir pada saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021, pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Kota Batu. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, angka kemiskinan naik sejak 2019 sebanyak 7.890 orang dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 8.120 orang. Sektor pariwisata merupakan penggerak dominan perekonomian di Kota Batu. Maka saat sektor tersebut terganggu otomatis sektor-sektor lainnya juga ikut terganggu seperti pusat oleh-oleh, pedagang kaki lima, kafe, restoran, hotel, dan lain-lain.

Pentingnya unsur kesehatan (*health*) di dalam pembangunan sektor pariwisata diakui oleh pihak Dinas Pariwisata Kota Batu, terutama pada saat pandemi Covid-19 terjadi.

*“Dinas Pariwisata sepakat dalam pengembangan pembangunan pariwisata menggunakan hexa belix ini menyertakan sektor kesehatan. Karena ini masa pandemi dan juga sesuai program-program yang kami paparkan.”* (Eni, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota

Batu, pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

Hal ini juga diakui oleh perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu.

*“Di masa pandemi ini, Pemkot Batu harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dari berbagai stakeholder seperti triple helix, penta helix, kemudian sekarang hexa helix.”* (Sopa, perwakilan Bappeda Kota Batu, pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

Adapun beberapa program yang dimaksudkan sebagai upaya pemulihan perekonomian Kota Batu pada sektor pariwisata di tengah pandemi, sebagai berikut:

1. Mitigasi bencana non alam, antara lain:
  - a. Kajian terhadap dampak bencana penularan Covid-19 di sektor pariwisata bukan menjadi penyebab penyebaran Covid-19 di Kota Batu.
  - b. Penutupan operasional tempat usaha wisata mulai 13 Maret 2020 untuk memutus tali penularan Covid-19.
  - c. Melakukan pendataan kepada tempat usaha wisata terdampak Covid-19, khususnya jenis usaha wisata, jumlah karyawan dan kondisi sarana prasarana.
  - d. Merencanakan dan mengusulkan bantuan kepada tempat usaha wisata terdampak.

Pada 2020 ada dana hibah yang diberikan kepada pengusaha hotel dan restoran dari pemerintah pusat, agar bisa tetap bertahan dikarenakan hotel dan restoran tutup total selama pandemi.

2. Langkah program teknis yang dilaksanakan:
  - a. Pemberian bantuan sarana dan prasarana protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan *portable*, toilet *portable*, masker, disinfektan, *hand sanitizer*.
  - b. Pemberian bantuan sosial tunai dan sembako kepada karyawan tempat usaha wisata terdampak. Pemberian bantuan ini berbeda-beda bentuk dan jumlahnya bergantung dari pemerintah pusat.
  - c. Menyalurkan bantuan dari Kemenparekraf kepada tempat usaha wisata hotel dan restoran yang terdampak.
  - d. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pelaku wisata.



3. Pembuatan regulasi Wali Kota Batu dalam kegiatan usaha pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif sesuai standar protokol kesehatan.
4. *Reopening* usaha pariwisata Kota Batu melalui supervisi Satgas Covid-19 Kota Batu, dengan *standart operating procedure* (SOP). Pelaksanaan edukasi protokol kesehatan, dalam layanan wisatawan di tempat usaha pariwisata, oleh Tim Dinas Pariwisata, dengan kewajiban *management* usaha wisata menyediakan hal-hal sebagai berikut:
  - Membuat *standart operating procedure* (SOP) layanan protokol kesehatan bagi wisatawan.
  - Membuat gugus tugas pelaksanaan protokol kesehatan dan struktur organisasinya.
  - Menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan, alat pemeriksa suhu tubuh, *hand sanitizer*, menjaga jarak dan pengaturan arus keluar masuk wisatawan.
  - Menyediakan ruang isolasi
  - Menyediakan banner publikasi *standart operating procedure* (SOP) protokol kesehatan
  - Menyediakan ambulan bagi destinasi besar
  - Memiliki koneksitas layanan Rumah Sakit (RS) dan tenaga kesehatan (Nakes).
  - Pengajuan permohonan pembukaan oleh *management* usaha wisata kepada satgas Covid-19.
  - Verifikasi lapangan oleh tim satgas Covid-19 gabungan tim yang beranggotakan unsur: Disparta, Dinkes, BPBD, Satpol PP, TNI dan Polri, PHRI.
  - Analisis dan kajian kelayakan pembukaan usaha wisata.
  - Pemberian sertifikat kelayakan usaha wisata sesuai protokol kesehatan bagi yang memenuhi persyaratan *standart operating procedure* (SOP) dan sertifikat digunakan sebagai dokumen perizinan *reopening* usaha wisata di tengah pandemi.
5. Program pengawasan dan *monitoring* pelaksanaan protokol kesehatan di tempat usaha wisata, melalui:
  - a. Pembentukan Tim Pengawas pelaksanaan protokol kesehatan dalam layanan wisatawan, terdiri dari:
    - Pembentukan Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan oleh Wali Kota dan Kapolres Batu.
    - Pembentukan Tim Satgas Pengawas protokol kesehatan dari unsur Dinas Pariwisata Kota Batu.

- b. Pelaksanaan pengawasan gabungan oleh Satgas Covid-19 Kota Batu kolaborasi dengan TNI dan Polri.
6. Penutupan usaha wisata menyeluruh Kota Batu berdasarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4/3 yang ditetapkan.
  7. Sosialisasi dan supervisi pengurusan sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safe, Environment, and Sustainability*) Kemenparekraf Republik Indonesia bagi *management* tempat usaha wisata sebagai persyaratan usaha pariwisata di tengah pandemi.
  8. Sosialisasi dan supervisi penggunaan QR Code PeduliLindungi Kemenkes sebagai persyaratan wajib bagi pengunjung tempat wisata untuk mengunduh aplikasi tersebut saat memasuki tempat wisata.
  9. Dukungan percepatan vaksinasi untuk warga Kota Batu, melalui kolaborasi dengan asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi kepariwisataan, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan seni budaya. Pelaku pariwisata diwajibkan melakukan vaksinasi untuk mempercepat program vaksinasi ini, karena tingkat vaksinasi juga mempengaruhi tingkat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
  10. Supervisi oleh dinas pariwisata kepada asosiasi untuk pengajuan bantuan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan sarana prasarana usaha pariwisata kepada Kemenparekraf.
  11. Sedangkan untuk evaluasi uji coba dan pelaksanaan pembukaan tempat usaha pariwisata di Kota Batu sebagai berikut, tempat wisata yang dibuka dalam rangkaian uji coba dan rekomendasi untuk dibuka yaitu:
    - Taman Rekreasi Selecta
    - Jatim Park 2
    - Mall Batos
    - Cinemapolis Bioskop Lippo Mall, dengan ketentuan, usia pengunjung minimal 12 tahun maksimal 60 tahun dengan catatan tidak dalam keadaan komorbid, tetap menerapkan *psychal distancing*, memakai masker dan dilarang makan di dalam ruangan).

Empat usaha tersebut diatas berdasarkan pengawasan dari Dinas Pariwisata, telah mampu menjalankan layanan yang baik dan sesuai *standart operating procedure* (SOP), khususnya:

- a. Telah memiliki sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safe, Environment, and Sustainability*).
- b. Karyawan telah divaksinasi.
- c. Telah menggunakan QR code pedulilindungi.
- d. Memiliki standar *standart operating procedure* (SOP) layanan uji coba.

Kemudian memaksimalkan sinergitas dari stakeholder supaya pariwisata segera bangkit, maka pemerintah Kota Batu menjalin sinergitas dengan sektor-sektor terkait, terutama dalam situasi ini Dinas Kesehatan terkait percepatan vaksinasi yang juga berpengaruh pada level PPKM. Juga Dinas Sosial untuk dapat merangkul wisata wisata yang terdampak pandemi.

“*Semua unsur dari pemerintah daerah sampai desa harus terlibat agar paling tidak 70% masyarakat sudah tervaksinasi agar bisa turun ke PPKM level 1.*” (Eni, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Batu pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021).

**Gambar 9. Foto Bersama Usai Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Batu, 1 Oktober 2021.**



(Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 1 Oktober 2021).

## Keterkaitan Enam Unsur (Hexa Helix) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep

Perspektif *hexa helix* dalam proses pengembangan pembangunan pariwisata merupakan suatu rantai yang saling berkesinambungan dan saling berketergantungan antar enam unsur yang ada. Seperti halnya dalam proses pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep, unsur akademik menjadi pihak yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan suatu program pembangunan pariwisata yang tepat sasaran sesuai dengan potensi yang terdapat di Sumenep yakni melalui hasil penelitian yang telah dilakukan.

*“Dari sisi akademik saya berpikir sampai sekarang tentang bagaimana sebenarnya keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan pariwisata khususnya untuk Kabupaten Sumenep itu melibatkannya hanya penelitian.”* (Irma Irawati, Dekan FISIP Universitas Wiraraja ada saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021).

Maka, untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan, baik potensi maupun kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengembangan pembangunan pariwisata, pihak akademisi memerlukan bantuan dari unsur masyarakat yang dapat memberikan aspirasi dan masukan kepada peneliti, baik sebagai seorang pelaku usaha wisata maupun seorang atau komunitas dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Selain itu, pihak akademisi juga dapat menjadi pihak yang dapat menyediakan sumber daya manusia sebagai seseorang yang nantinya akan terjun secara langsung kepada lingkungan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya dengan memiliki kualitas kemampuan kompetensinya yang memenuhi standardisasi dalam menerapkan pelayanan yang terbaik.

*“Sehingga sumbangsib dari perguruan tinggi khususnya dari prodi Adminsitrasi Publik di FISIP Universitas Wiraraja yaitu mengeluarkan kurikulum berupa muatan lokal pembangunan pariwisata.”* (Irma Irawati, Dekan FISIP Universitas Wiraraja ada saat *Focus Group Discussion* (FGD) di Kabupaten Sumenep, 17 September 2021).

Setelah memaksimalkan pembangunan pariwisata baik dari segi infrastruktur pariwisata maupun ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku atau pemandu wisata yang berkualitas, maka

dibutuhkan pengembangan lanjutan dalam rangka pemasaran destinasi wisata dalam menarik wisatawan untuk berkunjung. Pelaku wisata dalam hal ini membutuhkan peran media dalam mengemas berita menarik untuk menggambarkan destinasi wisatanya agar dikenal khalayak ramai. Adapun dalam menggunakan jasa media pasti membutuhkan biaya sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi seseorang.

Tidak perlu menunggu gelontoran bantuan dana dari pemerintah, maka masyarakat dalam hal ini adalah pelaku wisata perlu bekerja sama dengan pihak swasta yang berorientasi pada profit, dimana dalam kerja sama tersebut dapat menumbuhkan simbiosis mutualisme baik memberikan bantuan modal dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, bersama pihak swasta atau bisnis juga dapat mengedukasi terkait dengan manajemen keuangan maupun *ticketing* yang berlaku pada suatu destinasi wisata, yang sesuai dengan standardisasi manajemen keuangan.

Adapun selama masa pandemi Covid-19, terdapat unsur terakhir yang menjadi unsur terbaru yaitu kesehatan. Seluruh unsur yang terdapat dalam *hexa helix* memiliki peran yang penting dalam membantu penerapan unsur kesehatan di sektor pariwisata. Akademisi dan pemerintah wajib menjadi informan dalam memberikan informasi serta mengedukasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan pariwisata. Pemerintah bersama pihak swasta atau bisnis saling mendukung bantuan pengadaan fasilitas dalam menunjang penerapan protokol kesehatan seperti termogran dan tempat cuci tangan. Sedangkan media membantu menyebarkan informasi kepada khalayak ramai berkaitan dengan patuh prokes selama berwisata, atau mengedukasi masyarakat untuk menerapkan prokes di lingkungan wisata.

### **Keterkaitan Enam Unsur (Hexa Helix) Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kota Batu**

Ada tujuh aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Ke tujuh aktivitas tersebut melibatkan stakeholders yang ada, mulai dari unsur akademik, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media.

**Tabel 4. Aktivitas Pengembangan Pariwisata di Kota Batu.**

No	Aktivitas	Tugas/ Peran
1	Invensi (Invention)	semua
2	Identifikasi (Identification)	Akademisi, Masyarakat, Pemerintah
3	Pembangunan (Development)	Pemerintah, Pengusaha, Masyarakat
4	Pembingkaiian Isu (Framing)	Wisatawan, Media, Pemerintah, Masyarakat, Akademisi
5	Promosi (Promotion)	Semua Unsur, Media, Pemerintah, Komunitas Pengusaha, Pengelola
6	Pemaketan (Packaging)	Pengelola dan Pengusaha
7	Pembinaan (Fostering)	Semua unsur, masyarakat, pemerintah

*(Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu, 4 November 2021).*

Unsur kesehatan sangat berperan dalam pemulihan sektor pariwisata selama masa pandemi covid-19 berlangsung. Sehingga tidak hanya tujuh aktivitas di atas yang memerlukan peranan dari semua unsur yang ada. Dalam menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata juga membutuhkan peranan dari berbagai pihak (*stakeholders*), khususnya dalam menekan penyebaran covid-19 serta meningkatkan vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan masyarakat terhadap virus covid-19 (*herd immunity*).



# MODEL HEXA HELIX PEMBANGUNAN PARIWISATA

## Unsur Pendidikan (*Academic*)

Unsur akademik, atau dunia pendidikan dalam pembangunan sektor pariwisata memiliki peran penting (Damayanti, 2019). Unsur akademik yang dimaksud bisa dari sekolah menengah, terutama sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan pariwisata dan sejenisnya, maupun pendidikan tinggi, seperti sekolah tinggi dan perguruan tinggi. Sekolah menengah kejuruan menjadi sumber (*resources*) bagi tenaga kerja yang dapat bekerja pada berbagai industri dan usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti perhotelan, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Alumni sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan pariwisata akan menjadi tenaga terampil yang bekerja di sektor pariwisata.

Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian (*research*) dan kajian yang hasilnya bisa dijadikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Purnaningrum & Ariqoh, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi tidak hanya berupa rekomendasi kebijakan, namun bisa juga dalam bentuk penemuan baru (*invention*), yang bisa dijadikan bahan oleh para pelaku, untuk membuka kegiatan usaha pariwisata. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memberi sumbangsih, berupa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM), baik yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa. Selain itu perguruan tinggi juga dapat menjadi sumber (*resources*) yang bisa melahirkan para sarjana yang bekerja di berbagai usaha dan industri berkaitan dengan sektor pariwisata pada berbagai kompetensi yang dimiliki. Keterlibatan unsur akademik dalam pembangunan sektor pariwisata bisa dalam dua model. *Pertama*, inisiatif dimulai oleh

dunia akademis. Sekolah atau perguruan tinggi melakukan kegiatan di sektor pariwisata berdasarkan inisiatif sendiri untuk terjun dan terlibat di dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, sesuai dengan keahlian, jurusan dan kemampuan yang dimiliki pihak akademis. Kegiatan penelitian perguruan tinggi dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian (Machfuzhoh et al., 2021). Kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan perguruan tinggi bisa menggunakan pendanaan skema dana mandiri, dana internal perguruan tinggi, maupun pendanaan yang dibiayai oleh Kemendikbud dan Ristek Republik Indonesia dalam berbagai jenis pendanaan hibah dan lain-lain.

*Kedua*, inisiatif dari pemerintah. Model ini bisa berupa inisiatif kegiatan datang dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah daerah dapat mengajak keterlibatan dunia akademik dalam kegiatan sektor pariwisata (Umar et al., 2019). Misalnya dengan memperkuat sekolah menengah kejuruan pada jurusan dan keahlian yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Bila belum ada jurusan yang berhubungan dengan sektor pariwisata, maka pemerintah melalui dinas pendidikan mengadakan jurusan tersebut. Bila jurusan yang berkaitan dengan sektor pariwisata sudah ada, maka perlu ditambah fasilitas dan laboratorium yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu tentu saja mengadakan berbagai kegiatan magang industri bagi para siswa yang membuat kompetensi siswa di jurusan pariwisata semakin mumpuni dan ahli. Pelibatan siswa pada kegiatan atau event yang digelar oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhubungan dengan pariwisata mendapat pendampingan dari sekolah menengah kejuruan yang sudah memiliki jurusan pariwisata melalui siswa-siswa yang melakukan kegiatan magang. Begitu pula dengan keterlibatan perguruan tinggi di dalam pengembangan sektor pariwisata, bisa dimulai dari inisiatif pemerintah daerah atau pemerintah desa, berupa kerjasama penelitian dan pengabdian, atau *sharing* program dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting dari kedua hal tersebut adalah, keterbukaan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalam menerima



berbagai temuan (*invention*) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, baik berupa riset hasil kebijakan, maupun produk yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Setiawan, 2016). Penerimaan tersebut, lebih lanjut akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada hasil riset yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Selama ini, hasil riset yang berasal dari perguruan tinggi, hanya sebatas jadi bahan diskusi, tidak berlanjut pada pemanfaatan kebijakan pembangunan sektor pariwisata. Banyak sekali hasil penelitian (*research*) dari perguruan tinggi, baik yang dilakukan oleh dosen, yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional tidak diambil sebagai rujukan (referensi) dalam perumusan dan evaluasi kebijakan di sektor pariwisata. Begitu pula dengan hasil skripsi mahasiswa yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, hampir tidak pernah dijadikan pertimbangan di dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan pembangunan di sektor pariwisata, baik di tingkat daerah maupun tingkat desa.

Adapun kegiatan dari perguruan tinggi lebih banyak diterima dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Seperti pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di berbagai kantor dan instansi pemerintah. Begitu pula dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa, sangat diterima dengan baik dan difasilitasi oleh aparat pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa (Darmadi & Muhlisin, 2016). Hal ini menunjukkan sudah ada iktikad baik (*good will*) dari pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalam melibatkan kalangan akademis.

### **Unsur Dunia Usaha (Business)**

Unsur bisnis dan usaha (*business*) memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Ringa et al., 2018). Sekecil apalagi sebesar apapun kegiatan usaha yang dilakukan pada sektor pariwisata, tetap besar artinya untuk pengembangan sektor pariwisata. Pada era demokrasi, dimana pembangunan apapun termasuk pembangunan sektor pariwisata menuntut adanya partisipasi publik. Semakin besar partisipasi publik, semakin baik bagi pengembangan pembangunan pariwisata. Setiap usaha yang dijalankan pada sektor pariwisata memiliki nilai tambah bagi pembangunan di daerah. Begitu

pula dengan pembangunan di desa, sangat besar peranan dunia usaha.

Kenyataannya, meski dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki pemerintah daerah terbilang besar, bisa mencapai angka Rp 2 triliun rupiah, namun tetap saja dana tersebut separuhnya dihabiskan untuk membiayai gaji dan honor aparat pemerintah, tunjangan dan kebutuhan rutin perkantoran dan dinas. Selebihnya baru dipergunakan untuk proyek pembangunan. Masalahnya tidak hanya sampai disitu, tidak semua dana yang dianggarkan untuk proyek pembangunan, dapat dialokasikan untuk kegiatan usaha atau membuka lapangan pekerjaan secara langsung, karena memang pemerintah dilarang untuk berbisnis secara langsung. Namun dana tersebut secara umum dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana juga infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan fasilitas pelayanan. Selain itu dana tersebut dipergunakan untuk proyek atau program pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Kalaupun dipergunakan untuk program yang berkaitan dengan usaha, tidak lebih dari kegiatan pemberdayaan dan penampungan bagi kelompok yang kurang mampu.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum pemerintah membutuhkan dunia usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk juga menggerakkan sektor pariwisata. Dunia usaha/ bisnis yang selanjutnya membuka usaha-usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Lahan yang menjadi milik pemerintah sekalipun juga dapat dikerjasamakan dengan sektor swasta (*private sector*) yang terjun langsung dalam pengelolaan usaha di sektor pariwisata. Dunia usaha/ bisnis yang mengelola langsung kegiatan sektor pariwisata perlu mendapat kemudahan di dalam kegiatan usahanya. Sehingga mereka merasa dimudahkan untuk melakukan kegiatan usaha (investasi) di sektor pariwisata. Keberadaan dunia usaha/ bisnis di dalam sektor pariwisata, akan menambah ramai dan semarak kegiatan pariwisata. Suatu daerah/ lokasi wisata yang ramai dan semarak, selanjutnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan (*tourist*), baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke suatu daerah/ lokasi wisata.

Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan oleh dunia usaha/ bisnis tentu saja akan menambah pemasukan bagi daerah atau desa, dalam bentuk pajak dan retribusi lainnya (Syamjaya, 2019). Terlebih lagi pajak

hotel, restoran, dan hiburan pajaknya lebih besar bisa mencapai 21%. Hal ini akan menjadi pemasukan yang besar bagi suatu daerah yang sektor pariwisatanya bergerak maju, ditopang oleh dunia usaha/ bisnis. Semakin banyak yang berkunjung dan berwisata, maka semakin besar pula pemasukan suatu daerah. Untuk selanjutnya, pemasukan yang besar dari pajak yang dibayarkan oleh dunia usaha/ bisnis kepada daerah, akan menambah modal pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan, dan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pariwisata.

Tidak berhenti disitu, sektor pariwisata juga secara langsung berdampak pada perekrutan tenaga kerja (Dewi et al., 2019). Banyaknya usaha yang bergerak di sektor pariwisata juga akan memperkejakan banyak tenaga kerja. Pada saat banyak tenaga kerja yang bekerja, maka pengangguran semakin berkurang. Saat pengangguran semakin minim, maka semakin banyak orang yang sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Dengan begitu, potensi gangguan sosial juga semakin minim. Minimnya gangguan sosial akan semakin menguatkan kondisi pariwisata yang aman, nyaman dan damai, tanpa tindakan kriminalitas atau premanisme yang mengganggu kelancaran kegiatan wisata.

Secara tidak langsung, pelan tapi pasti dunia usaha/ bisnis yang bergerak di sektor pariwisata juga akan menciptakan efek lanjutan (*trickle down effect*) terhadap perekonomian suatu daerah (Larasati, 2017). Efek lanjutan ini berupa terbukanya peluang usaha baru, dalam skala kecil yang diciptakan oleh para pekerja yang telah memiliki pemasukan, yang sebagian diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian lagi disimpan untuk diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan. Misalnya dengan membuka usaha makanan, minuman, jasa layanan, dan lain-lain. Setiap usaha yang dibuat akan merekrut tenaga kerja baru, selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Begitu seterusnya, sehingga keberadaan dunia usaha/ bisnis dapat menjadi penggerak utama di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Bahrudin, 2017). Semakin banyak dan semakin besar kegiatan usaha di sektor pariwisata, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, termasuk masyarakat secara umum. Dengan catatan, usaha/ bisnis

yang dijalankan merekrut tenaga kerja yang berasal dari daerah dimana kegiatan usaha tersebut dijalankan. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan unsur pertama, yaitu unsur akademik, yang harus menyiapkan sejak awal sumber daya manusia yang mumpuni, profesional dan memiliki kompetensi di bidang atau pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

### **Unsur Komunitas (*Community*)**

Komunitas (*community*) memiliki peran tidak kalah penting dengan sektor lain. Komunitas dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata. Kelompok masyarakat dalam arti luas. Bisa berupa karang taruna, kelompok pemuda desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), bisa pula kelompok ibu-ibu, atau masyarakat dalam arti umum (Hanajayani & Ariffuddin, 2018). Keberadaan kelompok masyarakat pada pengembangan pembangunan sektor pariwisata memiliki makna penting. Tanpa dukungan kelompok masyarakat kegiatan pariwisata, tidak mudah untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, dukungan penuh dari masyarakat akan memudahkan sektor pariwisata berkembang dan tumbuh maju.

Kesadaran masyarakat terhadap sektor pariwisata akan mempercepat pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Masyarakat yang sadar terhadap sektor pariwisata, tidak pasif, tetapi aktif di dalam mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata. Tidak hanya ikut mendorong tetapi turut serta ambil bagian di dalam kegiatan sektor pariwisata, dalam bentuk kegiatan sekecil dan sebesar apapun. Masyarakat yang sadar terhadap sektor pariwisata tidak akan menghalangi kegiatan usaha dan industri pariwisata di sekitarnya. Sebab dengan menghalangi kegiatan usaha dan industri pariwisata, justru akan menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Dukungan terhadap kegiatan usaha dan industri pariwisata akan membawa hasil positif terhadap perekonomian warga sekitar (Djabbar et al., 2021). Dengan keterlibatan dan dukungan masyarakat, maka masyarakat juga akan turut serta menikmati hasil usaha dan industri pariwisata. Bisa dengan menjadi karyawan, atau pekerja di salah satu usaha atau industri pariwisata. Bisa pula menjadi mitra positif bagi kegiatan usaha yang ada. Misalnya karang taruna yang aktif terlibat dalam

pengelolaan keamanan dan pengelolaan lahan parkir bagi wisatawan yang datang ke lokasi wisata. Adapun komunitas masyarakat lain yang memiliki kemampuan mengolah makanan dan minuman dapat pula berjualan di sekitar lokasi wisata dengan tetap menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Selain itu, komunitas masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membangun pariwisata akan berpikir untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat (Raharjana, 2012). Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata. Bisa jadi wisatawan yang datang, memang bertujuan untuk mengunjungi lokasi wisata yang sebelumnya sudah dikenal. Namun setelah mengetahui adanya lokasi wisata baru yang dibangun oleh masyarakat, bisa jadi pengunjung akan menjadikan lokasi wisata tersebut sebagai daftar (*list*) lokasi wisata yang akan dikunjungi selanjutnya.

Begitulah, peran masyarakat sangat penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat dapat mengambil peran yang lebih luas di dalam kegiatan pariwisata di suatu daerah (Sugianto, 2016). Masyarakat dapat menginisiasi pembukaan lokasi pariwisata, terutama berbasis alam yang saat ini semakin banyak digandrungi oleh wisatawan. Tentu saja dengan sedikit sentuhan dan penataan. Sehingga tidak perlu membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Untuk selanjutnya, dari pemasukan yang diperoleh dari wisatawan, baru dikembangkan berbagai fasilitas pendukung yang membuat wisatawan yang datang semakin nyaman dan ingin datang kembali.

Masyarakat yang tidak ramah terhadap wisatawan hanya akan menghambat kegiatan pariwisata di suatu daerah. Dengan begitu, artinya masyarakat sendiri menghalangi masuknya kegiatan usaha dan industri pariwisata, yang secara otomatis juga menghalangi masuknya pendapatan bagi warga sekitar (Sudiarta, 2019). Keramahan masyarakat, bisa dimulai dengan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap para pengunjung wisata. Tidak menghambat aktivitas hilir mudik kendaraan dari dan menuju tempat wisata. Bahkan memberi kemudahan bagi wisatawan yang mencari dan menanyakan lokasi wisata. Begitu pula dengan masyarakat di sekitar lokasi wisata yang menjalankan aktivitas ekonomi, seperti berjualan misalnya, memperlakukan semua wisatawan

sama, baik wisatawan yang berkantong tebal maupun wisatawan yang berkantong tipis, baik wisatawan yang datang dengan sepeda motor maupun wisatawan yang datang dengan kendaraan mewah, semuanya diperlakukan sama. Artinya, harga barang yang dijual kepada wisatawan tersebut sama saja, dengan harga yang wajar. Tidak memberlakukan harga yang beragam dan aneh-aneh pada barang yang dijual. Begitu pula dengan biaya parkir yang diberlakukan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Perlakuan yang berbeda dan diskriminasi akan membuat suasana wisata tidak nyaman, dan menciptakan citra (*image*) buruk bagi lokasi wisata tersebut. Untuk selanjutnya membuat wisatawan tidak berkenan untuk datang kembali, dan merekomendasikan kepada keluarga dan koleganya untuk tidak berkunjung ke lokasi wisata tersebut.

Penyadaran terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata perlu dilakukan, baik oleh kelompok sadar wisata yang sudah ada, dunia usaha/ bisnis yang telah menjalankan usahanya di lokasi tersebut, maupun oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa (Resnawaty, 2016). Sosialisasi terhadap kebijakan ramah wisatawan harus terus tetap dilakukan, dengan cara-cara persuasif dan edukatif. Sehingga, lama kelamaan akan terbentuk masyarakat secara umum yang sadar terhadap pariwisata, dan terlibat aktif mengambil bagian positif di dalam kegiatan pariwisata. Untuk selanjutnya akan merasakan manfaat, baik secara ekonomi maupun lainnya dari kegiatan pariwisata.

### **Unsur Pemerintah (Government)**

Pemerintah (*government*) memiliki peran penting dan sentral di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Simamora & Sinaga, 2016). Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab utama pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan. Mau tidak mau, pemerintah yang mendapat mandat dan amanat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan mengurus kepentingan rakyat, melaksanakan program pembangunan dan melayani kepentingan rakyat. Untuk hal tersebut pemerintah mendapatkan banyak sekali keistimewaan (*previlage*) yang tidak dimiliki kelompok lain di masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat regulasi, aturan dan kebijakan yang mengatur dirinya dan pihak lain, termasuk masyarakat secara umum. Pemerintah

juga memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) untuk membuat dan mengatur anggaran untuk dirinya dan pihak lain. Bahkan pemerintah memiliki fungsi pemaksaan (*coersive*) terhadap pihak lain untuk tunduk terhadap kebijakan dan aturan yang dibuat. Malah, untuk menegakkan hal tersebut pemerintah dapat memberi sanksi (*punishment*) bagi para pihak yang tidak mentaati kebijakan dan aturan yang dibuat. Pemerintah cukup memiliki kekuatan yang luar biasa (*powerfull*) di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pembangunan (*duty of development*).

Pada pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah memiliki beberapa peran berikut. *Pertama*, regulator. Peran sebagai regulator membuat pemerintah harus membuat berbagai kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Martins et al., 2017). Regulasi yang dibuat harus bisa memastikan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata bisa diatur dengan baik. Tidak ada pihak yang dirugikan dan dikurangi hak-haknya. Lebih dari itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat membuat kegiatan pariwisata bisa berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada hambatan yang terjadi. Kebijakan yang mempermudah, tidak mempersulit, tidak berbelit-belit. Regulasi yang dibuat tidak harus banyak, yang penting bisa memastikan bahwa kegiatan usaha dan industri wisata tidak merugikan para pihak yang juga ada di sekitar kegiatan pariwisata.

*Kedua*, fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah perlu memberi pelayanan dan arahan kepada para pihak yang terlibat di dalam kegiatan usaha dan industri pariwisata (Nurhayati, 2016). Fasilitator bisa dalam bentuk memberi fasilitas kepada para pihak yang berada di dalam sektor pariwisata. Pemerintah juga perlu memberi pelayanan dan pendampingan kepada usaha dan industri pariwisata yang baru tumbuh dan berkembang. Memberi pelayanan prima bagi para pihak (*stakeholders*) yang bergerak pada usaha dan industri pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah mengambil peran sebagai wasit jika terjadi sengketa atau konflik para pihak yang bekerja dan berusaha di sektor pariwisata. Termasuk memberi pencerahan dan penyuluhan terhadap para pihak, mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha dan industri pariwisata (Ridlwani et al., 2017). Dengan begitu para pelaku usaha dan industri mendapat arahan (*guiden*), di

dalam melaksanakan kegiatan di sektor pariwisata. Kesalahan di dalam melaksanakan kegiatan akan menyebabkan kerugian bagi pelaku, yang bisa berujung pada pemberian sanksi (*punishment*) baik, berupa denda administratif, keuangan, maupun sanksi lain yang dapat merugikan, baik secara material maupun moral.

Ruang lingkup menjadi fasilitator dapat pula dalam bentuk pembangunan terhadap berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata (Ghani, 2017). Misalnya pembangunan akses jalan dari dan menuju lokasi wisata. Hal ini penting untuk dilakukan, untuk memudahkan para wisatawan untuk mencapai lokasi wisata dengan nyaman. Memastikan daerah lokasi wisata sebagai daerah yang aman untuk dikunjungi para wisatawan. Sehingga pemberian pos-pos keamanan menuju lokasi-lokasi wisata juga perlu dilakukan. Begitu pula dengan akses transportasi yang masih belum memadai, perlu dibangun dan difasilitasi oleh pemerintah, sampai kemudian pihak swasta atau pihak lain mampu menyediakan secara mandiri kepada para wisatawan.

Lebih luas lagi, jangkauan fungsi fasilitator yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi fasilitas yang mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pariwisata yang ada (Sujai, 2016). Salah satunya adalah dengan adanya kalender wisata yang dibuat setiap tahun oleh pemerintah, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat umum dan wisatawan. Selain itu adanya informasi yang lengkap yang disediakan oleh pemerintah mengenai objek dan lokasi wisata yang ada di daerahnya. Informasi tersebut senantiasa diperbarui (*update*) sesuai dengan data terbaru yang terus berkembang. Tidak kalah pentingnya adalah tersedianya informasi rute atau kendaraan yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk mencapai lokasi/ objek wisata yang ada. Termasuk berbagai pilihan dan alternatif yang ada, dan tarif serta biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Hal tersebut menjadi lebih lengkap pada saat pemerintah memberi atau menyediakan semacam call center yang dapat memudahkan wisatawan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan wisata di daerah. *Call center* yang dimaksud memang disediakan secara khusus oleh pemerintah untuk melayani informasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan. *Call center*



yang dapat dijangkau oleh semua kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berkaitan dengan hal tersebut, *call center* menyediakan petugas yang menguasai dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal tersebut tentu saja sangat membantu bagi para wisatawan yang akan dan sedang berkunjung.

## **Unsur Media**

Media juga memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan pariwisata (Supriadi & Maharani, 2021). Media yang dimaksud disini adalah media massa mainstream yang ada di suatu daerah yang memiliki potensi wisata. Media massa, baik berupa koran, radio, televisi, dan media online dapat menjadi sarana publikasi yang efektif untuk mempromosikan lokasi wisata yang ada. Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat (Klapper, 1960). Media juga dianggap memiliki peran sangat penting dalam mentransmisi (*relaying*) dan menstimulasi permasalahan (Negrine, 1996). Hal ini sangat penting dalam sosialisasi produk dan program juga ide-ide (Deacon & Monk, 2002). Cakupan (*coverage*) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program dan ide-ide atau barang serta pembentukan image.

Media massa, menjadi sarana yang cukup efektif dan signifikan untuk menggiring opini sesuai keinginan, dalam konteks perubahan ke arah yang lebih baik (Ruliana & Dwiantari, 2015). Di media, diolah setiap isu, opini, pendapat dan peristiwa. Saat ini era digital dan teknologi, tidak bermaksud mensubstitusi media jenis lain, media elektronik menjadi salah satu jenis media yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengelola sebuah isu dan opini publik. Dulu, media broadcasting (TV) paling banyak diminati masyarakat, dengan penetrasi hampir 90%. Teknologi informasi yang sedemikian cepat dan maju membuat dunia dan warga semakin menyatu dan seperti tanpa sekat. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain, dalam waktu yang hampir bersamaan dapat diketahui oleh penduduk yang berada di belahan dunia lain. Hal ini menjadi peluang tersendiri untuk menciptakan media yang cepat dari yang sekarang ada. Faktor kecepatan dalam dunia broadcasting, pertelevisian menjadi hal penting dan utama.

Televisi yang sering terlambat dalam menginformasikan peristiwa akan ditinggalkan oleh pemirsa/ publik. Sebaliknya, televisi yang cepat akan selalu menjadi rujukan dalam peristiwa sehari-hari. Dengan catatan tanpa meninggalkan faktor akurasi dan keberimbangan. Disusul media radio 43%, majalah 24%, koran 16%, outdoor 11%, dan internet 9%. Ke depan, media audio visual (baca; TV) akan semakin kuat perannya seiring dengan keunggulan yang dimiliki karena sifatnya lebih nyata (pandang dan dengar). Apalagi konsumen TV juga semakin dimanjakan dengan berbagai program hiburan yang bersifat gratis. Sekarang petanya menjadi terbalik, konsumen berita yang ada di internet lebih tinggi daripada yang mengakses televisi dan radio. Hal ini dipermudah oleh gawai (*gadget*) yang harganya relatif murah dan terjangkau, begitu pula dengan paket data yang bersaing setiap operator, dengan pilihan paket yang ramah terhadap konsumen. Sehingga warga yang menikmati berita dan informasi beralih ke internet yang ada di gawai masing-masing.

Keberadaan media yang sedemikian banyak, terutama media daring (*online*) membuat pemberitaan atau info wisata begitu mudah untuk diperoleh (Fitriani, 2017). Masing-masing pengelola media daring berlomba untuk menjadi yang terdepan menginformasikan jika ada tempat wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut juga efektif untuk meningkatkan pengunjung ke website yang memberitakan tempat wisata tersebut. Bahkan media terkadang melebih-lebihkan informasi yang ada, supaya kekurangan dari lokasi wisata tersebut tidak menonjol, tetapi yang terpublikasi adalah sisi baik dan menariknya. Sementara sisi kekurangan dan tidak baik dari lokasi wisata dikurangi.

Terlebih lagi jika media yang ada bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata atau Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah, maka penulisan berita juga cenderung positif (Marta, 2019). Kerjasama yang dimaksud bisa berupa kerjasama paket pemberitaan dan iklan yang dikemas sedemikian rupa antara pemerintah daerah dengan media tertentu. Sehingga media cenderung memberitakan hal-hal yang positif saja dari wisata yang ada. Kondisi ini pada satu sisi membuat pembaca atau penonton atau pendengar akan mudah terpengaruh untuk datang ke lokasi-lokasi wisata yang diberitakan. Namun dalam negatifnya adalah, pada saat wisatawan sudah datang ke lokasi wisata tersebut, dan mendapati apa yang diberitakan tidak sesuai

dengan kenyataan di lapangan, akan menimbulkan kekecewaan yang berujung pada sikap wisatawan yang tidak merekomendasi keluarga dan koleganya ke lokasi wisata tersebut.

Meski begitu ada media yang mengambil posisi netral dan mengambil jarak terhadap berbagai pemangku kepentingan sektor pariwisata, baik pemerintah maupun dunia industri (Dwinary & Nugraha, 2020). Saat ada berita positif dan menarik untuk diberitakan, maka media tersebut memberikan sisi positif, baik, dan menarik tersebut. Namun jika ada sisi negatif dan buruk (*bad*) dari kegiatan pariwisata, media tersebut tetap memberitakannya. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab moral, sebagai media yang memiliki fungsi kontrol terhadap berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada. Media seperti ini tetap ada pada di daerah yang menjalankan program pembangunan sektor pariwisata. Hal ini menjadi bagian dari peran positif media, supaya apapun peristiwa yang terjadi, baik positif maupun negatif tetap diberitakan.

Begitu pula keberadaan media sosial memberi warna lain dalam pemberitaan sektor pariwisata. Meski dalam kasus tertentu, pemilik media sosial, secara personal kritis terhadap peristiwa yang terjadi. Namun keberadaan media sosial lebih besar memberi dampak positif dalam publikasi sektor pariwisata (Retnasary et al., 2019). Pemilik media adalah warganet yang suka dengan swafoto (*selfie*) maupun video, sehingga terjadi promosi otomatis (*self promotion*) pada saat warga mengupload kegiatan wisata yang dilakukan di akun media sosial masing-masing.

### **Unsur Kesehatan (*Health*)**

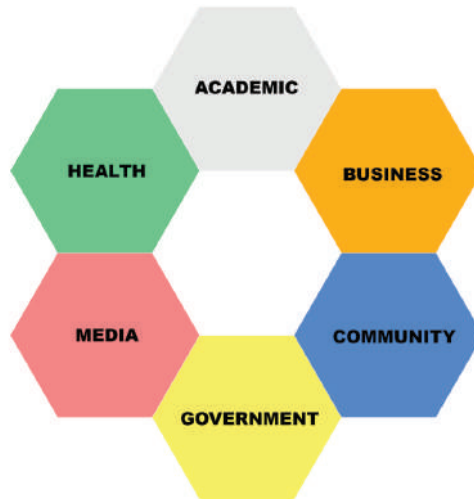
Unsur kesehatan ternyata juga memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Pandemi covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa unsur kesehatan di sektor pariwisata, menunjukkan peran sangat penting (Sugihamretha, 2020). Pada saat semua unsur yang ada di dalam penta helix yang meliputi unsur; akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media telah berperan maksimal di dalam pembangunan sektor pariwisata, namun ada persoalan pada unsur kesehatan, maka seluruh unsur di penta helix tersebut menjadi sia-sia, atau bahkan menjadi tidak berguna sama sekali.

Unsur kesehatan ini yang di dalam penelitian ini ditemukan dan menjadi unsur baru di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Astirin et al., 2020). Penelitian ini menemukan satu unsur baru dalam pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata yang selama ini lebih dikenal dengan istilah penta helix, sekarang memiliki unsur baru, menjadi hexa helix. Unsur baru tersebut adalah unsur kesehatan (*health*). Unsur kesehatan selama ini tidak dibahas secara khusus dan mendalam di dalam pembangunan sektor pariwisata. Namun pada saat terjadi pandemi covid-19 yang mengganggu kesehatan manusia, maka unsur kesehatan menjadi satu unsur yang perlu mendapat perhatian di dalam pembangunan sektor pariwisata.

Kondisi ini memberi catatan penting bagi pembangunan sektor pariwisata, bahwa usaha dan industri pariwisata harus senantiasa memperhatikan aspek kesehatan (Kadarisman, 2021). Di setiap lokasi wisata harus ada alat pendeteksi bagi wisatawan yang berkunjung, terutama deteksi terhadap wisatawan yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya transmisi virus atau penyakit yang membahayakan bagi wisatawan lain. Dengan begitu, para wisatawan yang datang berkunjung bisa berwisata dalam kondisi yang sehat, tidak sakit, dan tidak menularkan penyakitnya kepada wisatawan lain. Hal ini juga tentu saja sama dengan memastikan lokasi wisata dan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, tidak menyimpan virus atau dapat menjadi penyebab wisatawan sakit. Sehingga lokasi wisata tidak hanya aman dan nyaman bagi wisatawan, namun juga menyehatkan.

Di setiap lokasi wisata perlu tersedianya fasilitas kesehatan dan berobat bagi wisatawan. Bersamaan dengan itu tentu saja ada tenaga medis yang bertugas untuk membantu wisatawan dalam menjaga diri dari potensi ancaman yang akan mengganggu kesehatan. Sehingga setiap wisatawan yang datang dapat mawas diri untuk menjaga kesehatan selama menjalani aktivitas wisata di lokasi wisata. Tenaga medis dapat memberi pertolongan pertama bagi para wisatawan yang mendapat masalah kesehatan. Dengan begitu wisatawan akan tetap aman, nyaman dan sehat selama berwisata. Unsur pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep perspektif hexa helix dapat dilihat di dalam gambar berikut.

Gambar 10. Unsur pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep perspektif hexa helix, 2021.



(Hidayaturrahman, et al, 2021).

### Keterkaitan Unsur Hexa Helix

Setiap unsur di dalam hexa helix; *academic*, *business*, *community*, *government*, *media*, dan *health* memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Keterkaitan tersebut tidak bersifat tunggal atau linier, tetapi bersifat multi, dan bisa saling silang (*cross*). Hal tersebut memungkinkan terjadi karena masing-masing unsur memiliki peran yang beragam, dan hubungan serta keterikatan yang beragam pula. Namun ada unsur yang memiliki posisi dan peran sentral di dalam keterkaitan seluruh unsur *hexa helix*, yaitu unsur pemerintah (*government*). Seluruh unsur di dalam *hexa helix* tetap berkaitan dengan pemerintah. *Pertama*, *academic*. Unsur *academic* memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintah (*government*). Kajian yang dilakukan oleh dunia akademik, berguna bagi analisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya sebagai basis analisis kebijakan, namun juga dapat digunakan untuk bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan sektor pariwisata yang sudah berjalan. Hasil penelitian (*research*) yang dihasilkan oleh kampus, baik yang sudah dipublikasi maupun belum, dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa yang memiliki program pembangunan sektor pariwisata yang relevan

dengan objek dan lokasi penelitian. Selain kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kampus juga dapat menjadi program kerjasama (kolaborasi) antara pemerintah dengan perguruan tinggi.

Pada bagian pengabdian kepada masyarakat dan penelitian (*research*) juga memiliki kaitan dengan masyarakat (*community*). Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dijadikan bahan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pariwisata oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tridharma perguruan tinggi, dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kegiatan dan program di sektor pariwisata. Keterkaitan antara perguruan tinggi dengan masyarakat dapat bersifat rutin dan intensif, sebab perguruan tinggi memiliki program rutin seperti praktik kerja lapangan (PKL) dan kuliah kerja nyata (KKN).

Perguruan tinggi juga memiliki keterkaitan dengan dunia usaha (*business*). Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dapat mengikuti program magang di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Program pemagangan tersebut dapat diikat dalam perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dunia usaha. Kemudian lulusan perguruan tinggi dapat bekerja di perusahaan atau industri yang bergerak di sektor pariwisata. Perguruan tinggi dapat menyesuaikan materi perkuliahan dengan kebutuhan industri. *Kedua, business* (usaha). Dunia usaha di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan pemerintah (*government*). Dunia usaha pada saat hendak menjalankan usahanya perlu mendapatkan berbagai izin dari pemerintah sesuai dengan level dan ketentuan yang berlaku. Begitu pula pada saat menjalankan usahanya, dunia usaha perlu menaati ketentuan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, dunia usaha terikat pada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Termasuk kewajiban lain-lain yang berlaku pada setiap daerah.

Dunia usaha juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat (*community*) di mana usahanya dijalankan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengusaha tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat setempat.

Malah sebaliknya, kegiatan usaha perlu memberdayakan masyarakat di dalam kegiatan usahanya, menggandeng dan melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai karyawan maupun sebagai mitra dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan masyarakat dimana usaha tersebut dijalankan. Sehingga keberadaan dunia usaha di sektor pariwisata akan membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar, bukan masalah, atau dampak negatif.

Dengan unsur akademik, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain, dunia usaha tentu saja memiliki keterkaitan dalam kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM). Usaha atau industri yang bergerak di sektor pariwisata tentu saja membutuhkan banyak tenaga kerja, dari berbagai level, baik staf, manajer sampai ke jajaran direksi. Semuanya berasal dari lembaga pendidikan, baik menengah maupun pendidikan tinggi. Semakin baik kualitas hasil lulusan lembaga pendidikan, maka semakin mudah perusahaan untuk mempekerjakan alumni lembaga pendidikan. Sebaliknya, semakin tidak profesional lulusan lembaga pendidikan, semakin sulit untuk direkrut oleh perusahaan. Kalaupun harus merekrut diperlukan pendidikan khusus sesuai kebutuhan perusahaan, dan itu membutuhkan biaya tambahan.

*Ketiga, community* (masyarakat). Sebaliknya kegiatan sektor pariwisata yang dijalankan secara mandiri dan swakelola oleh masyarakat dapat menjadi objek kajian dan penelitian (*research*) yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat bersifat timbal balik (*reciprocal*). Selanjutnya hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan bahan untuk pengembangan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula dengan pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian tersebut, sebagai acuan untuk melakukan program yang tepat, kepada pelaku usaha di bidang pariwisata yang selama ini telah dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Apakah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dan sebagainya.

*Keempat, government* (pemerintah). Di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang ada di dalam hexa helix. Pemerintah (*government*)

memiliki keterkaitan dengan unsur akademik, baik perguruan tinggi, maupun sekolah menengah. Keterkaitan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk penelitian (*research*) maupun dalam bentuk pengabdian. Pemerintah juga memiliki keterkaitan dengan lembaga pendidikan untuk memberi arahan mengenai kurikulum di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dan memiliki tanggung jawab untuk mengucurkan anggaran kepada lembaga pendidikan, dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.

Adapun dengan dunia usaha (*business*) pemerintah (*government*) memiliki keterkaitan di dalam memberikan ijin terhadap kegiatan usaha yang diajukan. Untuk selanjutnya, pemerintah (*government*) bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dijalankan oleh dunia usaha, supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan jika ada, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan teguran dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran. Bahkan bila diperlukan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran yang telah disampaikan. Pemerintah (*government*) dalam menjalankan perannya perlu dilakukan secara intensif, berupa pendekatan persuasif dan pembinaan kepada dunia usaha.

Sedangkan dengan masyarakat (*community*), pemerintah juga memiliki keterkaitan, terutama di dalam upaya penyadaran terhadap masyarakat supaya ramah (*friendly*) terhadap sektor pariwisata. Sosialisasi terkait kegiatan usaha dan industri di sektor pariwisata membawa dampak positif berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu pemerintah (*government*) tentu saja memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat setempat, sehingga mau berdaya dan memanfaatkan potensi yang ada dengan adanya kegiatan usaha atau industri di sektor pariwisata. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bisa berupa pemberian keterampilan (*skill*) dan modal usaha, sehingga warga sekitar bisa mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. Berkaitan dengan unsur kesehatan (*health*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan sektor pariwisata dijamin kesehatannya, baik pelaku wisata, pengunjung dan lainnya. Fasilitas yang berkaitan dengan jaminan kesehatan tersebut disediakan oleh pemerintah. Selama ini



yang disediakan hanya pos lalu lintas dan pos keamanan (*security*) yang disediakan oleh pemerintah di dekat lokasi wisata. Ke depan fasilitas layanan kesehatan juga harus disediakan di lokasi-lokasi yang ada objek/ lokasi wisata. Dengan begitu jika ada gangguan kesehatan, bisa dilakukan pertolongan pertama.

*Kelima*, media. Media memiliki keterkaitan dengan pemerintah, dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah (*government*). Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah di sektor pariwisata perlu diawasi oleh media, jika terjadi penyimpang perlu diberitakan. Begitu pula dengan dunia usaha (*business*) perlu mendapat kontrol dari media massa, bila terjadi pelanggaran terhadap regulasi atau kebijakan yang ada, perlu diberitakan oleh media. Baik pemerintah maupun dunia usaha diharapkan taat kepada aturan dan ketentuan yang ada. Pada sisi lain, media dapat menjadi mitra pemerintah (*government*) dan dunia usaha (*business*) di dalam mempromosikan berbagai potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah dan dunia usaha. Media juga dapat berperan penting di dalam mendesiminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga dapat ketahui dan diakses oleh masyarakat secara umum.

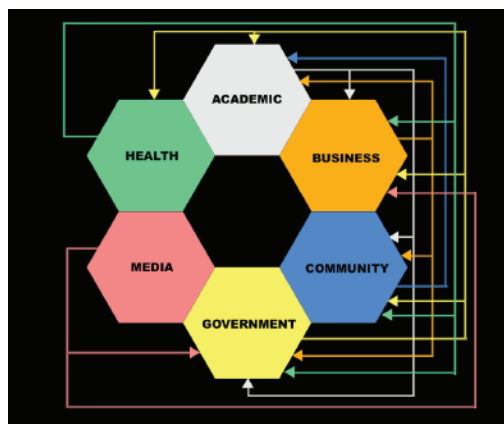
*Keenam*, *health* (kesehatan). Kesehatan memiliki keterkaitan dengan hampir seluruh unsur di dalam hexa helix, mulai dari bisnis, komunitas, dan pemerintah. Seluruh unsur tersebut perlu kesehatan. Bila ada yang mengalami gangguan kesehatan, maka tidak dapat berfungsi atau berperan dengan baik. Bahkan pada kasus covid-19 yang menjadi bencana non alam, maka seluruh peran dan fungsi yang dijalankan oleh kelima unsur (*penta helix*), tidak dapat berjalan. Kegiatan sektor pariwisata betul-betul berhenti secara penuh (total). Selama dua tahun industri pariwisata hampir tidak bergerak sama sekali. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian pada dunia usaha, jangankan pendapatan yang diperoleh, untuk menjalankan usaha secara rutin kesulitan.

Begitu pula dengan pemerintah, pada saat kegiatan usaha di sektor pariwisata tidak berjalan, maka pemerintah tidak mendapatkan pemasukan berupa pajak dan retribusi yang selama ini biasa diterima. Saat pemasukan dari pajak dan retribusi tidak diperoleh, maka pemerintah kesulitan membiayai belanja pembangunan yang selama ini telah disusun. Terjadi hal sebaliknya, banyak program pemerintah yang

mengalami pengarahannya kembali (*refocusing*). Program yang ada dikoreksi dan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi. Bila kesehatan masyarakat tidak pulih, maka sektor lain termasuk ekonomi dan pariwisata juga tidak dapat kembali berjalan.

Masyarakat sekitar yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi ikutan (*trickle down effect*) dari kegiatan usaha atau industri pariwisata, juga merasakan dampaknya. Karena sektor pariwisata tidak berjalan, maka otomatis kegiatan warga dari usaha kuliner, usaha transportasi, usaha rumah kos, jasa *laundry*, dan lain sebagainya juga berhenti. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian tersendiri, karena tidak ada pemasukan bagi warga sekitar lokasi wisata yang selama ini tergantung kepada kegiatan usaha dan industri wisata.

**Gambar 11. Keterkaitan hexa helix di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata, 2021.**



(Hidayaturrahman et al, 2021).

## KESIMPULAN

Pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur telah melibatkan semua unsur di dalam hexa helix, yang terdiri dari dunia pendidikan (*akademic*), dunia usaha (*business*), masyarakat (*community*), pemerintah (*government*), media (*mass media*), dan kesehatan (*health*). Dunia pendidikan terdiri dari perguruan tinggi. Adapun dunia usaha, terdiri dari pengusaha besar dan kecil. Begitu pula dengan masyarakat, terdiri dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemandu wisata. Sedangkan pemerintah terdiri dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Media massa terdiri dari

berbagai media, cetak, elektronik, dan online, serta media sosial. Unsur kesehatan terdiri dari dinas kesehatan, satgas covid, dan pihak lain-lain yang membantu penanganan kesehatan. Masing-masing unsur di dalam hexa helix memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Unsur pendidikan berperan di dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dunia pendidikan juga berperan di dalam mempromosikan objek wisata yang ada melalui riset yang dipublikasikan. Dunia pendidikan juga dapat berperan di dalam pembinaan kepada pelaku usaha sektor pariwisata, melalui pengabdian kepada masyarakat. Dunia usaha memiliki peran di dalam membangun objek wisata, termasuk membangun fasilitas di sekitar lokasi wisata, dan mempromosikan wisata yang dikelola. Masyarakat berperan di dalam mengembangkan lokasi wisata yang ada, dan menciptakan citra (*image*) positif terhadap wisata yang ada. Pemerintah berperan di dalam membina pelaku usaha dan masyarakat, selain memberi fasilitas serta kebijakan yang bijak, bagi seluruh pihak. Termasuk juga mempromosikan dan melakukan *branding* terhadap pariwisata yang ada sehingga memiliki citra positif. Media memiliki peran untuk mempromosikan potensi wisata, juga mengedukasi wisatawan yang datang, termasuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dan pengusaha. Pihak yang memiliki tanggung jawab di bidang kesehatan, dalam hal ini dinas kesehatan, dan satgas covid-19 serta pihak lain berperan di dalam menjaga supaya tidak ada penularan covid-19 di semua objek wisata, serta mempercepat vaksinasi pada pelaku wisata dan pengunjung wisata. Sehingga sektor pariwisata bisa kembali normal. Selain itu, ada keterkaitan masing-masing unsur hexa helix di dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata. Unsur akademik memiliki keterkaitan dengan pemerintah, komunitas dan pengusaha. Sedangkan dunia usaha memiliki keterkaitan dengan dunia akademik, pemerintah, media dan masyarakat. Adapun masyarakat memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah. Pemerintah memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, media dan pelaku kesehatan. Media massa memiliki keterkaitan dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Adapun pelaku kesehatan memiliki keterkaitan dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.

## Saran dan Rekomendasi

1. Perlu adanya peningkatan peran dari masing-masing unsur *hexa helix* untuk mengembangkan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
2. Perlunya memperhatikan keterkaitan di antara unsur *hexa helix* dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
3. Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pembangunan sektor pariwisata perlu berperan aktif di dalam melibatkan seluruh *stakeholders* di dalam sektor pariwisata, sehingga terlibat secara langsung, aktif, dan intensif di dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep, mulai dari akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah di berbagai level dan instansi terkait, media massa dan pelaku media sosial, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan.
4. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep dengan perspektif *hexa helix* untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi.
5. Pemerintah perlu membentuk tim pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep di masa pandemi meliputi enam unsur.
6. Pemerintah perlu melakukan pendistribusian wewenang secara proporsional kepada semua unsur *hexa helix* dengan menyusun *standart operating procedure* (SOP).
7. Tim pengembangan sektor pariwisata *hexa helix* perlu menyusun program dan kegiatan secara terukur dan terintegrasi dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi.
8. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi kerja tim pengembangan pariwisata *hexa helix* secara berkala.



# DAFTAR PUSTAKA

- Astirin, O. P., Nugraha, S., & Utomowati, R. (2020). Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Lingkungan Melalui Program Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.20961/semar.v9i1.42309>
- Bahrudin, A. (2017). Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah). *Mimbar Administrasi*, 1(1), 50–69. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/572/556>
- Damayanti, L. S. (2019). Peranan Keterampilan Berbahasa Inggris Dalam Industri Pariwisata. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 2(1), 71–82. <https://doi.org/10.46837/journey.v2i1.42>
- Darmadi, & Muhlisin. (2016). Ecotourism development of islamic based. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 60–65.
- Dewi, I. G. A. I. S., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2019). Peranan Perusahaan Modal Asing Dalam Pengembangan Sumber Daya Pekerja Lokal di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA*, 13(2), 90–96. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1212>
- Djabbar, A., Rizal, J., & Rizaly, E. N. (2021). Dampak Keberadaan Sektor Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Home Creative “Lentera Donggo” Kecamatan Soromandi Bima NTB. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pariwisata*, 1(1), 14–20. <http://journal.ainarapress.org/index.php/jppmp/article/view/58>
- Dwinary, A., & Nugraha, F. A. (2020). Komodifikasi Pemberitaan; Analisis Framing Entman Pada Pemberitaan Pariwisata Halal Di Harian Republika. *Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Journalistik*, 6(1), 1–18. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/12213/8639>

- Fajar, M., & Rahman, W. (2021). Techno-Sociopreneurship Tourism Industry : Model Pengelolaan Daerah Tertinggal Menuju Daerah Maju dan Berdaya Saing. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(1), 27–34. <https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/25>
- Farkic, J., Isailovic, G., & Taylor, S. (2021). Forest bathing as a mindful tourism practice. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 2(2), 100028. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2021.100028>
- FERNÁNDEZ, J. A. S., MARTÍNEZ, J. M. G., & MARTÍN, J. M. M. (2021). An analysis of the competitiveness of the tourism industry in a context of economic recovery following the COVID19 pandemic. *Technological Forecasting and Social Change*, 174(October 2021), 121301. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121301>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>
- Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4(1), 22–31. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp22>
- Hanajayani, G., & Ariffuddin, S. (2018). Mengatur Desa Wisata: Peran Tokoh Masyarakat Membangun Inisiatif Kolektif Organising Rural Tourism : The Role of Local Champion to Build. *Jurnal Tata Loka*, 20(2), 195–204.
- Hasan, A., & Hermawan, B. (2018). Model pengembangan ekonomi pariwisata. *Jurnal Media Wisata*, 16(1), 639–650. <https://doi.org/https://doi.org/10.36276/mws.v16i1.258>
- Hilman, Y. A., & Kartika, T. (2020). Dinamika Kelembagaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ponorogo. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v1i1.82>
- Hogg, A., Baldock, T., & Pritchard, D. (2011). Strathprints Institutional Repository. *Journal of Fluid Mechanics*, 666, 521.
- Hulu, M. (2018). Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus: Desa Wisata “Blue Lagoon” Di Kabupaten Sleman, Diy. *Journal of Tourism and Economic*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.36594/jtec.v1i2.23>

- Kadarisman, A. (2021). Government public relations dalam pengembangan pariwisata masa pandemi COVID-19 di Geopark Ciletuh. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(2), 270. <https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.29800>
- Kriswibowo, A. (2016). Potensi pembangunan industri pariwisata berbasis masyarakat di Jawa Timur . Sebuah Studi tentang Social Capital sebagai Sustainable Resources Arimurti Kriswibowo Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pampang. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 1(1), 1–14.
- Kronenberg, K., & Fuchs, M. (2021). Aligning tourism's socio-economic impact with the United Nations' sustainable development goals. *Tourism Management Perspectives*, 39(May), 100831. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100831>
- Kurnia, K. F. (2019). Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 4(1), 1–14.
- Lambaihang, G. G. (2018). Dampak berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 2009 dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan batuputih bawah kecamatan ranowulu. *Lex Et Societatis*, VI(2), 76–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19956>
- Larasati, D. (2017). Analisis Trickle Down Effect Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1–9. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3644/3232>
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(3), 260. <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.260-265>
- Li, P., Xiao, X., & Seekamp, E. (2022). Climate adaptation planning for cultural heritages in coastal tourism destinations: A multi-objective optimization approach. *Tourism Management*, 88, 104380. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104380>
- Machfuzhoh, A., Pertiwi, W. N. B., Syaifudin, R., & Utami, M. M. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pendampingan Melalui Perguruan Tinggi : Kampung Kreasi Lukis Cilegon. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 41–48. <https://doi.org/10.31537/dedication.v5i1.438>

- Marta, R. (2019). Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(2), 102–112. <https://doi.org/10.25077/rk.3.2.102-112.2019>
- Martins, Z., Paturusi, S. A., & Surya, I. B. K. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Area Branca Metiaut, Dili. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 3(2), 372–386. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2017.v03.i02.p12>
- Musthofa, B. M. (2019). Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Vocational Program University of Indonesia*, 7(2), 1–11.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1, Issue 1).
- Nurhayati. (2016). Analisis investasi sektor pariwisata oleh pemerintah daerah kota batam tahun 2014. *Jurnal Dimensi*, 5(2), 1–22.
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2), 138. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.34>
- Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif. *Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif*, 16(2), 117–127. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v1i6i2>
- Purnaningrum, E., & Ariqoh, I. (2019). Google Trends Analytics dalam Bidang Pariwisata. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 232–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2069>
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3), 225–237. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Resnawaty, R. (2016). Strategi Community Practice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1), 105–118. <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13152>
- Retnasary, M., Setiawati, S. D., Fitriawati, D., & Anggara, R. (2019). Pengelolaan Media Sosial Sebagai Strategi Digital Marketing Pariwisata. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 1(1), 76–83.



- Ridlwan, M.A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9933>
- Ringa, M. B., Setiawina, N. D., & Dewi, M. H. U. (2018). peran pemerintah, sektor swasta dan modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, 3(2), 1–9. <http://www.jurnal.pnk.ac.id/index.php/bisman/article/view/351>
- Ruliana, P., & Dwiantari, R. (2015). Strategi Public Relations Hotel dalam Membentuk Citra Objek Wisata. *Jurnal ASPIKOM*, 2(4), 255. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i4.76>
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 23–35. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Setijawan, A. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoeearth*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i1.213>
- Setyowati, N. W., & Octavia, S. (2016). Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata pada Kawasan Wisata Danau Napabele Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(2), 374–392.
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 79–96.
- Sonder, I.W., & Yulianie, F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Bayunggede, di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 103–115.
- Sørensen, F., & Grindsted, T. S. (2021). Sustainability approaches and nature tourism development. *Annals of Tourism Research*, 91, 103307. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103307>

- Sudiarta, I. K. (2019). Gagap Komunikasi Menghadapi Kemajuan Pariwisata Pulau Nusa Penida (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung). *Satya Sastraharing*, 03(02), 39–53. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/387>
- Sugianto,A. (2016). Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong I Ponorogo. *Ekuilibrum : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v11i1.113>
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Sujai, M. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(1), 61–76.
- Sumenep, profil kabupaten. (2021). Profil Kabupaten Sumenep. *Profil Kabupaten Sumenep*, 0–20.
- Supriadi, I. B. P., & Maharani, I. A. K. (2021). Peran media komunikasi dan efeknya bagi pengembangan desa wisata di bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 124–132.
- Syamjaya. (2019). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, 2(2), 22–28.
- Umar, A., Burhanuddin, & Nasrulhaq. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.57-66>
- Withaningsih, S., Noorahya, F., Megantara, E. N., Parikesit, & Husodo, T. (2018). Nest existences and population of pangolin (*Manis javanica desmarest*, 1822) at the designated area of cisokan hydropower, West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 19(1), 153–162. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d190122>
- Yanti, I. E. K. (2020). Kewenangan pengelolaan desa wisata dalam perspektif peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.16.2.738.59-68>

- Yatmaja, P.T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>
- Yuli, A. (2011). City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 5 (1) (1), 50–68.
- Yulianti et al., D. (2019). Peranan Masyarakat Lokal Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Lampung. *Naskah Publikasi. Universitas Lampung*.



# RIWAYAT PENULIS I

## DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dr. Mohammad Hidayaturrehman, M.I.Kom  
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 15 Januari 1977  
Alamat : Sumenep, Jawa Timur  
Telepon & WA : 0823 3292 0307  
Email : [hidayaturrehman@wiraraja.ac.id](mailto:hidayaturrehman@wiraraja.ac.id)  
Website : [www.mohammadhidayaturrehman.com](http://www.mohammadhidayaturrehman.com)

## PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.
3. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Akidah, Jakarta, lulus tahun 2002.

## PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

## PUBLIKASI JURNAL

1. “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele di Desa Patean Kecamatan Batuan.” Diterbitkan oleh Jurnal Abdimas Indonesia, Volume 1 No. 2, Agustus 2021.
2. “Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Ra’as Melalui Pendampingan Standarisasi Produk dan Kemasan.” Terbit di Jurnal Abdiraja, Volume 4 No. 1, Maret 2021.

3. "Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education." Terbit di Jurnal Al-Ta'lim, Volume 28, No. 1, 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
4. "Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic." Terbit di Jurnal Al Adabiya, Volume 16, No. 1, Juni 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
5. "Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19." Terbit di Jurnal Ijtimaiyya, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
6. "The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia." Terbit di Technology and Society, Volume 63, November 2020, (Science Direct, terindeks Internasional, Scopus Q1).
7. "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia." Terbit di Asian Journal of Comparative Politics, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
8. "Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom." Terbit di Jurnal Al-Tahrir, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
9. "Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep." Terbit di Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
10. "Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep." Terbit di Jurnal Sospol, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
11. "COVID-19: Public support to handle economic challenges." Terbit di Jurnal Inovasi Ekonomi, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
12. "The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig." Terbit di Jurnal DINIKA, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
13. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia." Terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
14. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).

15. "Integration Of Islam and Local Culture: *Tandhe'* in Madura." Terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
16. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

### **PUBLIKASI PROSIDING**

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
2. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thompson Reuters).
3. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thompson Reuters).
4. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." International Conferences Sdgs 2030 Challenges And Solutions, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

### **PUBLIKASI BUKU**

1. Negara Demokrasi Menghadapi Covid-19: Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan, diterbitkan oleh Edulitera Malang, September 2021.
2. Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan, diterbitkan oleh Unitomo Press, Surabaya, September 2021
3. Perilaku Voters pada Masyarakat Multikultural, diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2021.
4. Kutukan Demokrasi, diterbitkan oleh Edulitera Malang, 2021.
5. Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
6. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic expansion in remote island." Terbit di

CRC Press Taylor & Francis Group, Nopember 2020. (terindeks Internasional Scopus).

7. Teori Sosial Emprik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019.
8. Teori Sosial dan Pertentangannya. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018.
9. Media dan Pelayanan Publik. Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

## **PUBLIKASI DI MEDIA**

1. “Kerikil Sepatu Kekuasaan,” Terbit di [www.bermedia.id](http://www.bermedia.id), 12 April 2021.
2. “Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims.” Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. “COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity.” Terbit di ISA Social Tranformations and Sociology of Development, Edisi 09, Agustus 2020.
4. “Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World.” terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. “Melawan Covid-19 Dengan Cinta.” Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.
6. “Tak Ada (Salahnya) Madura Propinsi.” Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. “UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA.” Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. “Rekonsiliasi PascaPilkada.” Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

## **SPEAKERS**

1. Pembicara pada “Workshop Menulis Untuk Jurnal Internasional Scopus Bagi Pemula,” yang diselenggarakan oleh Media Akademika pada 13 Oktober 2021, secara daring, by Zoom. Materi yang disampaikan “Mengenal OJS dan Scopus serta Kiat Sukses Menembus Scopus Bagi Pemula.”
2. Pembicara pada “Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (PKTI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura,” yang diselenggarakan oleh Prodi Administrasi Publik, pada 9-11 Oktober

di Laboratorium FISIP Unija. Materi yang disampaikan “Mengelola kutipan, referensi dan online jurnal system.”

3. Pembicara pada acara “Webinar Kebangsaan Memperingati Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sapeken Sumenep (Himpass) pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 09.00-12.00 secara daring, via zoom. Judul Materi yang disampaikan “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.”
4. Pembicara pada acara “Literasi Digital Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada 12 Juli 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi “Perubahan Interaksi Sosial pada Era Digital.”
5. Pembicara pada acara “Literasi Digital Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi “Mendeteksi Ancaman Keamanan Digital di Media Sosial.”
6. Pembicara pada Diskusi Publik dengan topik “Demokrasi Kita Mau Kemana?” yang digelar oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bekerja sama dengan Data Sight pada tanggal 19 Juni 2021 secara daring via zoom. Judul Materi “Mengapa demokrasi mengutuk, dan bagaimana keluar dari kutukan demokrasi?”
7. Pembicara pada “Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?” Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
8. Pembicara pada “Seminar Nasional Public Speaking.” Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
9. Pembicara pada “Transintegration on Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
10. Pembicara pada “Pelatihan Menjadi Jurnalis.” Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
11. Pembicara pada “Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
12. Pembicara “Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi.” Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.



13. Pembicara “Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
14. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
15. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
16. Pembicara “Bedah Buku, Menegosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

## **PRESENTERS**

1. Presenter pada International Conference On Public Policy, Social Computing And Development (ICOPOSDEV), yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, pada 14-15 October 2021 secara daring, by Zoom. Judul penelitian yang dipresentasikan “The Successes and Failures of Three Democracies in Resolving Covid-19: Indonesia, The United States of America, and South Korea.”
2. Presenter pada The 1st International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST) “HUMANITY AND THE CHANGING OF SOCIAL AND POLITICAL LANDSCAPE IN POST COVID-19 WORLD” yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 15-16 September 2021, secara daring via zoom. Judul penelitian yang dipresentasikan adalah “Covid-19 and Money Politics in Direct Regional Head Elections.”
3. Presenter pada The Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung pada 30-31 Agustus 2021. Materi presentasi dengan judul “Poverty and the Excessive Role of Women Batik Craftsmen in Indonesia.”
4. Presenter pada Konferensi Internasional Da’wah dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh UIN Walingoso Semarang, pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring, via zoom meeting. Materi presentasi dengan judul “Failure of State Communication in Countering Terrorism to Muslim and Islamic Mass Organizations”.
5. Presenter pada International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 (ICHSoS) diselenggarakan oleh Universitas

- Muhammadiyah Malang yang digelar secara daring, pada tanggal 18-19 Juni 2021. Judul artikel yang dipresentasikan “Covid 19 and Medical Personnel in Social Choice Theory.”
6. Presenter pada “1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People’s Representative.” Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
  7. Presenter pada “Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
  8. Presenter pada “The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era.” Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.
  9. Presenter pada “The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era.” Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
  10. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title “Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources.”
  11. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
  12. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
  13. Presenter pada “The 1<sup>st</sup> International Conference on Islamic Studies (ICIS).” Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
  14. Presenter pada “Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur).” Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
  15. Presenter “Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik.” Diselenggarakan oleh FISIP Universitas

Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.

16. Presenter pada “Internasional Islamic Research Forum (IIRF).” Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 Nopember 2017.
17. Presenter pada “Seminar Internasional Studi Islam, Islam a Friendly Cultural Relegion.” Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.
18. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

## **REVIEWER**

1. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Januari 2020-sekarang.
2. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIPOL Wira Bhakti Denpasar, Bali, Agustus 2021.
3. Jurnal E-Saintika, Undikma, Nusa Tenggara Barat, 2021-sekarang.
4. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
5. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang.
6. Journal of Governenance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
7. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
8. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

## **PENGALAMAN PENELITIAN DIBIYAI**

1. Ketua Penelitian “Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix”, dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2021, sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pariwisata.
2. Ketua penelitian, “Why Development Failed”, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2019, sebesar

Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya artikel yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Pembangunan terakreditasi nasional Sinta 3. Terbit tahun 2020.

### **PENGALAMAN PENGABDIAN DIBIYAI**

1. Anggota pengabdian “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ra’as Kabupaten Sumenep” tahun 2020, bekerjasama dengan SKK Migas dan Kangean Energy Indonesia (KEI), sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Outnya artikel terbit di jurnal pengabdian Abdiraja tahun 2021, dan buku pedoman ber-HKI.
2. Ketua pengabdian masyarakat “Menggagas Desa Digital di Wilayah Kepulauan Sapeken, tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outnya program desa digital di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Selain itu artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2020.
3. Anggota pengabdian masyarakat “Melindungi Hak Paten dan Kekayaan Intelektual di Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,” tahun 2019, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya, artikel yang terbit di Journal of Community Service and Empowerment (JCSE) tahun 2021.

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

### **PENGALAMAN TUGAS**

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi

Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.

3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

## **AWARD**

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik “Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
3. Pemenang ke tiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007.



# RIWAYAT PENULIS 2

## DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP  
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 15 Juni 1984  
Alamat : Sumenep, Jawa Timur  
Telepon & WA : 0817 0392 3993  
Email : rillia@wiraraja.ac.id

## PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tahun 2017- sekarang
2. Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, lulus tahun 2014.
3. Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, lulus tahun 2006.

## PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, April 2011- sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Pengantar Ilmu Administrasi Publik; Teori Administrasi Publik; Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik; Perencanaan Pembangunan Daerah; Administrasi Pembangunan; Sistem Administrasi Negara Indonesia; Reformasi Administrasi; Pengembangan Perilaku Organisasi; Birokrasi).

## PUBLIKASI JURNAL

1. “Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep: Faktor Pendorong dan Penghambat di terbitkan oleh Jurnal Publisia Volume 6 (2) 2021 **DOI : 10.26905/pjiap.v6i2.6201** (terakreditasi SINTA 3).
2. “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep” diterbitkan oleh Jurnal Publisia Vol 4 No 2 (2019).

3. “Analisis Kebijakan Reformasi Manajemen Guru Dalam Perspektif Ekonomi Politik diterbitkan oleh Jurnal Public Corner Vol 14 No 1 (2019).
4. “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah Kecamatan Kota Sumenep” diterbitkan oleh Jurnal Public Corner Vol 13 No 2 (2018).
5. “Motivasi Pelayanan Publik (*Public Service Motivation*) Dalam Peningkatan Kinerja Sektor Publik” diterbitkan oleh Jurnal Public Corner Vol 12 No 1 (2018).
6. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep” diterbitkan oleh Jurnal Publisia Vol 2, No 2 (2017).
7. “IbM Pembangunan Desa Wisata Melalui Konsep Local Community Based” diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah MITSU Volume 5 No.2 (2017)  
**DOI:** <https://doi.org/10.24929/ft.v5i2.397>
8. “Strategi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sumenep” diterbitkan oleh Jurnal Public Corner Vol 9 No 1 (2016).
9. “Kapasitas Sumber Daya Perangkat Desa Di Desa Pabian Kabupaten Sumenep” Diterbitkan oleh Jurnal Public Corner Edisi 8 Desember 2015.

## **PUBLIKASI PROSIDING**

1. “Managing Collaborative Governance Dynamics in Agropolitan Development to face The New Normal Era“, terbit di Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business administration (AICoBPA 2020), series advances in economics, Business and Management Research, Atlantis Press, 30 September 2021 (Terindeks Scopus) <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.082>
2. “ Analysis of Local Government Effort in Local Economic Resources Development (A Case Study of Superior Commodity Development in Sumenep Regency)” terbit di Proceedings of The Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020), series Advances in Social Science, Educations and Humanities Research, 22 Oktober 2020 (Terindeks Scopus) DOI <http://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.013>
3. “Optimalisasi Core Competency Pendamping Desa dalam Mensukseskan Pembangunan Desa” terbit di Prosiding Konferensi

Nasional Ilmu Administrasi 2.0 (KNIA 2.0-2018) Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespon Era Revolusi Industri 4.0, 17 Oktober 2018.

4. “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep” terbit di Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs, 2016, Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. “Upaya Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa” terbit di Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers “Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Harapan Dan Tantangan”, 2014, IAPA Jatim bekerjasama dengan Univ. Wiraraja.

## **PRESENTERS**

1. Presenter pada 3rd Annual International Conference on Public and Business administration (AICoBPA 2020) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang pada Tanggal 26 Oktober 2020 dengan judul penelitian yang dipresentasikan “Managing Collaborative Governance Dynamics in Agropolitan Development to face The New Normal Era “.
2. Presenter pada Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020) yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang pada 02-03 Januari 2020 dengan judul penelitian yang dipresentasikan “ Analysis of Local Government Effort in Local Economic Resources Development (A Case Study of Superior Commodity Development in Sumenep Regency)” .
3. Presenter pada Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2.0 yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan judul penelitian yang dipresentasikan “Optimalisasi *Core Competency* Pendamping Desa dalam Mensukseskan Pembangunan Desa”.
4. Presenter pada Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs yang diselenggarakan oleh Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul penelitian yang dipresentasikan “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep”.
5. Presenter pada Seminar Nasional dan Call For Papers “Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Harapan Dan Tantangan” yang



diselenggarakan oleh IAPA Jatim bekerjasama dengan Univ. Wiraraja pada tahun 2014 dengan judul penelitian yang dipresentasikan “Upaya Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa”.

## **PENGALAMAN PENELITIAN DIBIYAI**

1. Anggota Penelitian “Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix”, dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2021, sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pariwisata.
2. Anggota Penelitian “Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis *Local Economic Resource Development* di Kabupaten Sumenep” dibiayai oleh DIPA BLU FIA UB, sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Outputnya Prosiding Terakreditasi Scopus dan Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3
3. Anggota penelitian “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah Kecamatan Kota Sumenep” dibiayai oleh Internal Universitas Wiraraja tahun 2017 sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah). Outputnya artikel yang terbit di jurnal Public Corner.
4. Anggota penelitian “ Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Desa Menuju Pembangunan Desa Mandiri dibiayai oleh Internal Universitas Wiraraja tahun 2016 sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Outputnya artikel yang terbit di jurnal Public Corner.
5. Anggota Penelitian “Strategi Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sumenep” dibiayai oleh Internal Universitas Wiraraja tahun 2015 sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Outputnya artikel yang terbit di jurnal Public Corner.
6. Anggota Penelitian “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dibiayai oleh Internal Universitas Wiraraja tahun 2014 sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Outputnya artikel yang terbit di Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang diselenggarakan UMSU 2016.

7. Anggota Penelitian “Upaya Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa” dibiayai oleh Internal Universitas Wiraraja tahun 2012 sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Outputnya artikel yang terbit di jurnal Public Corner.

## **PENGALAMAN PENGABDIAN DIBIYAI**

1. Anggota pengabdian “IbM Pembangunan Desa Wisata Melalui Konsep Local Community Based” dengan skema dana DIKTI tahun 2017 sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah). Outputnya berupa artikel yang terbit di jurnal MITSU tahun 2017.
2. Anggota pengabdian “Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Anggota pengabdian “Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Batang-Batang Laok Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2016 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
4. Anggota pengabdian “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Wirausaha Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
5. Anggota pengabdian “Upaya Peningkatan Tertib Administrasi di Desa Muangan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2014 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
6. Anggota pengabdian “IbM Pusat Informasi Desa Terintegrasi Sebagai Akses Informasi dan Media Komunikasi Bagi Masyarakat Pedesaan” dengan skema dana DIKTI tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah).
7. Anggota pengabdian “Upaya Peningkatan Tertib Administrasi di Desa Lembung Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2012 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
8. Anggota pengabdian “Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintah Desa di Desa Tambak Agung Barat Kecamatan Ambunten

kabupaten Sumenep” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja tahun 2011 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2012- sekarang.
2. Pengurus daerah DPD IAPA Jatim, Pokja I Sinergi antar Perguruan Tinggi tahun 2021-2024.

# RIWAYAT PENULIS 3

## DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Imam Hidayat S.AN., M.AP  
Tempat/ tgl lahir : Sumenep, 27 Desember 1991  
Alamat : Sumenep, Jawa Timur  
Telepon & WA : 085233568370  
Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id

## PENDIDIKAN

1. Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. S1 Administrasi Negara Universitas Wiraraja.

## PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Januari 2019-sekarang.  
(Mata kuliah yang diampu; Sistem Administrasi Negara Indonesia;  
Etika Administrasi Negara; Administrasi BUMN/ BUMD).
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Wiraraja.

## PUBLIKASI JURNAL

1. Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalahgunaan Gerakan People Power (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019.
2. Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep.
3. Menguji Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2019-2024.
4. Mobilitas Sosial Masyarakat Pesisir antar Pulau di Masa Pandemi (Studi pada pelabuhan rakyat antar pulau di wilayah kalianget).

## PUBLIKASI PROSIDING

1. Inovasi Pelayanan Publik “Arek Lancor “ Aplikasi Berbasis Online

Unit Reaksin Cepat Polisi Cyber (URC Cyber Police) dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4,0 di Polres Pamekasan

2. The contradiction of “Ojung” Culture at Batu Putih Vs Modern Islamic Values (Case Study Law Number 5 Of 2017 Article 26 Paragraph 3).

### **SPEAKERS**

1. Pembicara pada kegiatan Sekolah Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh BEM STKIP Sumenep.

### **PRESENTERS**

1. Presenter Pada Seminar Nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Teknologi “Optimalisasi Sumber daya local di Era Revolusi Industri 4.0”
2. Presenter The 3rd International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2019 “THE BEST PRACTICE OF ISLAMIC MODERATION IN HETEROGENEOUS SOCIETY”.

### **PENGALAMAN PENELITIAN DIBIYAI**

1. Anggota Penelitian “Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix”, dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep tahun 2021, sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pariwisata.
2. Anggota penelitian, “Why Development Failed”, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun 2019, sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya artikel yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Pembangunan terakreditasi nasional Sinta 3. Terbit tahun 2020.
3. Anggota Penelitian “Mobilitas Sosial Masyarakat Pesisir antar Pulau di Masa Pandemi (Studi pada pelabuhan rakyat antar pulau di wilayah kalianget)” dibiayai oleh Kepolisian Kabupaten Sumenep.

### **PENGALAMAN PENGABDIAN DIBIYAI**

1. Ketua pengabdian “Pemanfaatan Sistem Informasi Arsip di Desa Bilangan Kecamatan Batang- Batang” tahun 2021, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep sebesar Rp 3.500.000

(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya, artikel yang terbit di Journal Abdi Raja Universitas Wiraraja

2. Anggota pengabdian masyarakat “Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Melalui E-Busines di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang,” tahun 2021, dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Outputnya, artikel yang terbit di Jurnal Abdi Raja tahun 2022.
3. Anggota pengabdian “PKM Survei Potensi Desa Pinggir Papas” dengan skema dana internal Universitas Wiraraja Sumenep.

